



BANK INDONESIA

KAJIAN EKONOMI REGIONAL

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Triwulan II- 2008

Kantor Bank Indonesia
Mataram

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Triwulan II-2008

KANTOR BANK INDONESIA MATARAM

Penerbit :

BANK INDONESIA MATARAM

Kelompok Kajian Statistik dan Survei

Jl. Pejanggik No.2 Mataram

Nusa Tenggara Barat

Telp. : 0370-623600 ext. 111

Fax : 0370-631793

E-mail : b_widihartanto@bi.go.id

ariadi_d@bi.go.id

sariani@bi.go.id



Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

Visi Kantor Bank Indonesia Mataram

Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan.

Misi Kantor Bank Indonesia Mataram

Berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan bank serta memberikan saran kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

KATA PENGANTAR

Pada triwulan II-2008, perekonomian Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 3,65% (yoy) melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sumber pertumbuhan utama masih ditopang kegiatan konsumsi swasta dan pemerintah. Dari sisi penawaran, sektor-sektor andalan seperti seperti pertanian, pertambangan dan perdagangan, hotel dan restoran (PHR) tumbuh melambat. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kegiatan investasi fisik di Nusa Tenggara Barat, sektor bangunan tercatat mengalami percepatan pertumbuhan dan memberi andil terbesar pada pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Di sisi pembiayaan perbankan, penyaluran kredit untuk pembiayaan pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini terus menunjukkan peningkatan.

Di samping ulasan di atas, buku ini juga mengupas perkembangan sistem pembayaran, perkembangan keuangan serta prospek ekonomi ke depan yang dapat menjadikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia maupun *stakeholders* di daerah.

Bank Indonesia memiliki kepedulian tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penelitian dan kajian serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi termasuk pengendalian harga barang dan jasa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya kepada semua pihak terutama jajaran Pemerintah Daerah baik Propinsi, Kabupaten ataupun Kota, dinas/instansi terkait, perbankan, akademisi dan pihak lainnya yang telah membantu penyediaan data sehingga buku ini dapat dipublikasikan.

Semoga buku ini bermanfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat bagi kita semua dalam berkarya.

Mataram, Juli 2008
BANK INDONESIA MATARAM

Tri Dharma
Pemimpin

INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER
Propinsi Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR	2007				2008	
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2
MAKRO						
Indeks Harga Konsumen	143.86	145.30	146.95	151.04	159.27	111.90
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)	6.18	6.60	7.86	8.77	8.38	12.46
PDRB-harga konstan (miliar Rp)	3,545.31	3,907.34	4,415.15	4,150.36	3,665.38	4,093.43
-Pertanian	834.09	971.56	1,245.85	984.65	835.91	1,002.02
-Pertambangan & Penggalian	905.66	987.89	1,095.38	1,044.10	926.31	1,030.29
-Industri Pengolahan	166.21	191.72	196.53	211.18	177.43	206.07
-Listrik, gas dan air bersih	12.73	12.56	13.32	14.52	13.20	13.30
-Bangunan	245.85	256.56	320.55	300.31	267.51	297.31
-Perdagangan, Hotel dan Restoran	507.67	595.98	616.05	655.92	544.58	606.30
-Pengangkutan dan Komunikasi	286.90	307.83	325.27	329.90	297.91	306.69
-Keuangan, Persewaan dan Jasa	188.77	191.61	200.95	210.09	197.74	218.50
-Jasa	397.44	391.63	401.24	399.69	404.79	412.94
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	2.73	4.00	2.45	3.52	3.39	3.65
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	247.04	255.87	261.34	195.56	173.16	81.79
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	0.185	0.142	0.124	0.558	0.886	0.040
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	45.19	64.51	42.19	42.58	43.38	32.23
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	0.0188	0.023	0.029	0.016	0.018	0.013
PERBANKAN						
Bank umum :						
Total Aset (Rp triliun)	6.58	6.91	7.15	7.16	7.49	7.93
DPK (Rp triliun)	5.05	5.04	5.21	5.40	5.36	5.51
-Tabungan (%)	46.93	47.79	49.41	60.52	54.25	57.93
-Giro (%)	30.33	30.80	30.69	21.69	27.70	24.88
-Deposito (%)	22.74	21.41	19.90	17.79	18.05	17.19
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi proyek	4.45	5.01	5.16	5.47	5.51	6.17
-Modal Kerja	1.83	1.99	2.09	2.08	1.98	2.27
-Investasi	0.43	0.53	0.52	0.55	0.47	0.49
-Konsumsi	2.18	2.49	2.56	2.85	3.06	3.41
-LDR	na	na	na	na	na	na
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi kantor cab	3.94	4.38	4.69	4.75	4.90	5.46
-Modal Kerja	1.54	1.70	1.77	1.74	1.73	1.93
-Investasi	0.41	0.39	0.38	0.41	0.37	0.36
-Konsumsi	1.98	2.29	2.53	2.60	2.80	3.17
-LDR	78.02	86.92	89.93	87.87	91.37	99.08
Kredit UMKM (Rp triliun)	3.88	4.27	4.57	4.63	4.81	5.31
Kredit Mikro (<Rp50 juta) (Rp triliun)	2.93	3.24	3.43	3.44	3.57	3.93
-Kredit Modal Kerja	0.80	0.85	0.88	0.84	0.83	0.89
-Kredit Investasi	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.18
-Kredit Konsumsi	1.86	2.14	2.31	2.37	2.54	2.87
Kredit Kecil (Rp 50 < x < Rp500 juta) (Rp triliun)	0.46	0.47	0.54	0.55	0.58	0.66
-Kredit Modal Kerja	0.28	0.29	0.31	0.31	0.32	0.35
-Kredit Investasi	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07
-Kredit Konsumsi	0.11	0.12	0.17	0.18	0.20	0.25
Kredit Menengah (Rp 500 juta < x < Rp5 miliar) (Rp triliun)	0.49	0.56	0.61	0.64	0.66	0.71
-Kredit Modal Kerja	0.40	0.45	0.48	0.50	0.53	0.57
-Kredit Investasi	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09
-Kredit Konsumsi	0.02	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05
Total Kredit MKM (Rp triliun)	3.88	4.27	4.57	4.63	4.81	5.31
NPL MKM gross (%)	2.37	3.65	3.65	2.91	3.34	2.94
NPL MKM nett (%)	(0.07)	0.68	0.26	0.21	0.36	(0.01)
BPR :						
Total Aset (Rp triliun)	0.36	0.38	0.39	0.42	0.43	0.46
DPK (Rp triliun)	0.20	0.20	0.21	0.22	0.24	0.26
-Tabungan (%)	42.38	43.03	45.33	45.47	45.63	47.71
-Giro (%)	-	-	-	-	-	-
-Deposito (%)	57.62	56.97	54.67	54.53	54.37	52.29
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi proyek	0.28	0.28	0.30	0.31	0.32	0.35
-Modal Kerja	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20
-Investasi	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
-Konsumsi	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13
Kredit UMKM (Rp triliun)	0.28	0.28	0.30	0.31	0.32	0.35
Rasio NPL Gross (%)	10.80	11.88	10.93	10.03	11.03	10.69
Rasio NPL Net (%)	6.88	6.52	6.13	5.37	5.76	5.51

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Indikator Ekonomi dan Moneter.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
Bab 1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional	1
1. Kondisi Umum.....	1
2. Sisi Permintaan.....	2
3. Sisi Penawaran	6
4. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan	14
5. Keuangan Daerah	17
Bab 2 Perkembangan Inflasi.....	20
1. Kondisi Umum.....	20
2. Perkembangan Komponen Inflasi	21
3. Analisa Komoditas Penyumbang Inflasi	22
Bab 3 Perkembangan Perbankan Daerah	25
1. Intermediasi Perbankan.....	25
2. Perkembangan Aset Bank Umum.....	26
3. Penghimpunan Dana Masyarakat.....	26
4. Penyaluran Kredit.....	28
5. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum.....	33
6. Perkembangan Bank Syariah.....	34
7. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat.....	36
Bab 4 Perkembangan Sistem Pembayaran.....	39
1. Transaksi Non Tunai.....	39
2. Transaksi Tunai.....	41
3. Penemuan Uang Palsu	44
Bab 5 Prospek Ekonomi dan Harga.....	46
1. Prospek Ekonomi Nusa Tenggara Barat	46
2. Perkiraan Inflasi Nusa Tenggara Barat.....	47
Boks 1 Hasil Survei Nasional Pola Remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat.....	19a
Boks 2 Perubahan Cakupan Penghitungan Inflasi Nusa Tenggara Barat.....	22a
Boks 3 Implementasi Peran KBI Mataram Dalam Rangka Pengembangan Sektor Riil dan UMKM.....	38a

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi NTB.....	2
Grafik 1.2 Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga di NTB.....	3
Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi di NTB.....	3
Grafik 1.4 Perkembangan Volume Penjualan Semen di NTB.....	4
Grafik 1.5 Perkembangan Kredit Investasi di NTB.....	4
Grafik 1.6 Perkembangan PMTB di NTB.....	4
Grafik 1.7 Perkembangan Impor Barang Modal NTB.....	4
Grafik 1.8 Perkembangan Nilai Ekspor Impor NTB.....	5
Grafik 1.9 Perkembangan Volume Ekspor Impor NTB.....	5
Grafik 1.10 Struktur Ekonomi NTB Tw2-07.....	6
Grafik 1.11 Struktur Ekonomi NTB Tw2-08.....	6
Grafik 1.12 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi.....	8
Grafik 1.13 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Jagung.....	8
Grafik 1.14 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Kedelai.....	8
Grafik 1.15 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian di NTB.....	8
Grafik 1.16 Perkembangan Produksi Tembaga PT Newmont Nusa Tenggara.....	9
Grafik 1.17 Perkembangan Kredit Sektor Pertambangan di NTB.....	9
Grafik 1.18 Perkembangan Tingkat Hunian Kamar Hotel di NTB.....	10
Grafik 1.19 Perkembangan Kredit Sektor PHR di NTB.....	10
Grafik 1.20 Perkembangan Penjualan Semen di NTB.....	11
Grafik 1.21 Perkembangan Kredit Sektor Konstruksi di NTB.....	11
Grafik 1.22 Perkembangan Indikator Perbankan NTB.....	11
Grafik 1.23 Perkembangan Penumpang Internasional di Selaparang.....	13
Grafik 1.24 Perkembangan Kredit Sektor Transportasi dan Komunikasi di NTB.....	13
Grafik 1.25 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri di NTB.....	13
Grafik 1.26 Perkembangan Kredit Industri Pengolahan di NTB.....	13
Grafik 1.27 Perkembangan Kredit Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih di NTB.....	14
Grafik 1.28 Perkembangan Konsumsi Listrik per Jenis Penggunaan di NTB.....	14
Grafik 1.29 Pangsa Tujuan TKI asal NTB-Tw2-08.....	15
Grafik 1.30 Latar Belakang Pendidikan TKI asal NTB-Tw2-08.....	16
Grafik 1.31 Sektor Penempatan TKI asal NTB Tw2-08.....	16
Grafik 1.33 Perkembangan Remitansi NTB.....	16
Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi NTB dan Nasional.....	20
Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi NTB.....	20
Grafik 2.3 Perkembangan Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan ke depan.....	22
Grafik 2.4 Perkembangan Kapasitas Produksi.....	22
Grafik 2.5 Perkembangan Ekspektasi Harga Konsumen 3 bulan ke depan.....	22

Grafik 2.6 Perkembangan Ekspektasi Harga Konsumen 6 bulan ke depan	22
Grafik 2.7 Perkembangan Harga Komoditas Beras di Mataram.....	23
Grafik 3.1 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha.....	25
Grafik 3.2 Perkembangan DPK Bank Umum di NTB.....	26
Grafik 3.3 Pangsa DPK Bank Umum triwulan II-2008.....	27
Grafik 3.4 Pertumbuhan DPK BU berdasarkan kegiatan usaha	27
Grafik 3.5 Pertumbuhan Kredit dan Suku Bunga SBI.....	27
Grafik 3.6 Pertumbuhan Kredit (yoy)	28
Grafik 3.7 Pertumbuhan kredit sektor unggulan NTB.....	28
Grafik 3.8 Pangsa Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi trw II-2008.....	30
Grafik 3.9 Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum.....	30
Grafik 3.10 Perkembangan Indikator Perbankan Syariah.....	32
Grafik 3.11 Pangsa Bank Syariah terhadap perbankan NTB trw II-2008.....	34
Grafik 3.12 Perkembangan Rasio FDR dan NPF.....	35
Grafik 3.13 Perkembangan Indikator Perbankan Syariah.....	36
Grafik 3.14 Penyaluran kredit berdasarkan lokasi kantor BPR.....	37
Grafik 3.15 Rasio NPL BPR berdasarkan lokasi kantor	37
Grafik 4.1 Perkembangan Transaksi non tunai di NTB	39
Grafik 4.2 Transaksi kliring berdasarkan jenis bank di Mataram	40
Grafik 4.3 Perkembangan Transaksi RTGS di NTB	41
Grafik 4.4 Perkembangan Inflow, Outflow dan Netflow.....	42
Grafik 4.5 Rasio PTTB terhadap Cash Inflow di NTB.....	43
Grafik 4.6 Proporsi penukaran uang kertas keluar berdasarkan jenis pecahan.....	44
Grafik 4.7 Proporsi jumlah lembar uang Palsu yang ditemukan pada triwulan II-2008 berdasarkan pecahan.....	44
Grafik 4.8 Uang rupiah palsu yang ditemukan oleh perbankan di NTB.....	45
Grafik 5.1 Perkembangan Utilisasi Kapasitas Produksi	47
Grafik 5.2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi NTB.....	47
Grafik 5.3 Perkembangan Indeks Ekspektasi Harga 3 bulan ke depan	48
Grafik 5.4 Perkiraan Inflasi NTB.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Sisi Permintaan NTB	2
Tabel 1.2 Sumbangan Pertumbuhan Sisi Permintaan NTB.....	2
Tabel 1.3 Komoditas Ekspor Terbesar NTB Triwulan II-2008.....	5
Tabel 1.4 Komoditas Impor Terbesar NTB Triwulan II-2008.....	5
Tabel 1.5 Pertumbuhan Sisi Penawaran NTB.....	6
Tabel 1.6 Sumbangan Sisi Penawaran NTB.....	6
Tabel 1.7 Produksi Padi Tahun 2007 (Angka Sementara 2007).....	8
Tabel 1.8 Produksi Padi Tahun 2008 (Angka Ramalan I 2008).....	8
Tabel 1.9 Perkembangan Laba Sebelum Pajak Perbankan NTB.....	12
Tabel 1.10 Tabel Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	15
Tabel 1.11 Tabel Penduduk Miskin.....	17
Tabel 1.12 Tabel Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	17
Tabel 1.13 APBD Gabungan NTB Tahun 2008	18
Tabel 1.14 Perkembangan APBD NTB 2007-2008.....	19
Tabel 2.1 Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar Kota Mataram.....	23
Tabel 2.2 Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar Kota Bima	23
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Perbankan di NTB	25
Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Bank Umum di NTB	29
Tabel 3.3 Pertumbuhan Kredit Bank Umum di NTB.....	30
Tabel 3.4 Perkembangan kualitas kredit Bank Umum di NTB.....	31
Tabel 3.5 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum di NTB.....	33

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Perkembangan Ekonomi dan Perbankan

Asesmen Ekonomi

Perekonomian Nusa Tenggara Barat tumbuh melambat pada triwulan II-2008 mencapai 3,65% (yoy) dibandingkan triwulan II-2007 sebesar 4,83% (yoy). Pertumbuhan ekonomi NTB masih mengandalkan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Ketiga sektor tersebut masing-masing tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 2,73%, 0,21% dan 3,02% (yoy).

Kinerja sektor pertanian diperkirakan sedikit melambat akibat pergeseran musim serta kurang baiknya sistem irigasi pertanian di NTB. Musim kemarau yang telah tiba di pertengahan triwulan II-2008 menyebabkan sejumlah lahan tanam padi terancam puso karena keterbatasan pengairan. Hal tersebut terindikasi dari luas lahan tanam yang melebihi kapasitas irigasi, untuk wilayah Lombok Tengah tercatat luas lahan tanam sebanyak 19 ribu hektar sementara debit air yang ada hanya mampu mengairi 12 ribu hektar sehingga 7 hektar lahan terancam puso.

Perlambatan pertumbuhan di sektor pertanian juga tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha triwulan II-2008. Dari empat sub sektor pertanian, hampir seluruh sub sektor menunjukkan stagnasi pertumbuhan. Hanya sub sektor tanaman bahan pangan yang menunjukkan peningkatan produksi dengan nilai SBT 13.33. Diperkirakan sub sektor lainnya yakni sub sektor perkebunan baru akan mengalami peningkatan produksi pada triwulan III-2008 seiring tibanya musim panen tanaman palawija.

Di sisi lain, perlambatan kinerja juga ditunjukkan oleh sektor pertambangan yang didominasi kegiatan tambang tembaga. Saat ini PT Newmont Nusa Tenggara masih menunggu izin hutan pinjam pakai untuk areal seluas 32 hektar untuk area waste dumping. Area tersebut diperlukan agar kegiatan penambangan dapat dilanjutkan pada fase berikutnya. Dengan terkendalanya perizinan tersebut, maka kegiatan produksi konsentrat tembaga hanya mengandalkan sisa *stock pile* dengan kualitas *sub prime*.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi di NTB masih mengandalkan kegiatan konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat sebesar 5,48% (yoy) dengan andil sebesar 2,76% (yoy). Perlambatan pertumbuhan konsumsi tercermin dari hasil survei konsumen pada bulan Juni 2008 yang menunjukkan 51% responden cenderung menunda pembelian barang tahan lama, meningkat dibandingkan hasil survei pada Juni 2007 sebanyak 41,5% responden.

Kegiatan konsumsi rumah tangga ditengah kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM tertolong oleh pembayaran gaji ke-13 PNS dan penyaluran BLT di Kota Mataram. Sebagai catatan, pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp15,4 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 bagi para PNS di lingkup pemprov NTB pada bulan Juni 2008. Sementara Penyaluran BLT di wilayah NTB masih terkonsentrasi di Kota Mataram dengan daya serap mencapai 89,96%. Sedangkan penyaluran BLT untuk kota/kabupaten lainnya di wilayah NTB baru dijadwalkan mulai bulan Juli 2008.

Asesmen Inflasi

Sebagai imbas dari kenaikan tarif BBM, laju inflasi NTB pada triwulan II-2008 mulai merangkak naik. Pada akhir Juni 2008 angka inflasi Kota Mataram tercatat sebesar 11,84% (yoy) meningkat dari 9,52% (yoy) pada akhir Mei 2008. Sementara laju inflasi tahun kalendar (Januari-Juni) 2008 di Kota Mataram sudah menyentuh level 8,5% (ytd). Selain itu, laju inflasi yang lebih tinggi dicatat oleh harga-harga barang dan jasa di Kota Bima yakni sebesar 14,78 (yoy). Secara agregat inflasi di NTB menyentuh level 12,46% (yoy) di atas inflasi nasional sebesar 11,03% (yoy).

Penyumbang inflasi terbesar berasal dari komoditas bensin dengan andil pada inflasi mtm sebesar 0,98% atau ekuivalen dengan 30,52% dari total inflasi mtm Kota Mataram yakni 3,21%. Kenaikan harga bensin juga berdampak pada kenaikan harga komoditas barang dan jasa lainnya, seperti harga beras, semen, batu bata, tarif angkutan dan lainnya sehingga lonjakan inflasi menjadi tak terelakan.

Mencermati determinan inflasi ke depan, dari sisi permintaan terdapat indikasi kenaikan permintaan konsumsi rumah tangga. Hal tersebut tercermin dari peningkatan laju penyaluran kredit konsumtif. Untuk Juni 2008, pertumbuhan kredit konsumsi mencapai 37,48% (yoy) meningkat dibandingkan Juni 2007 dengan pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 23,09% (yoy). Peningkatan laju penyaluran kredit konsumtif tersebut dipengaruhi peningkatan biaya kebutuhan hidup masyarakat pasca kenaikan BBM yang tidak diimbangi kenaikan yang memadai dari sisi pendapatan masyarakat.

Asesmen Intermediasi Perbankan

Kondisi makro ekonomi yang kurang menggembirakan sepanjang triwulan II-2008 dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak pada 24 Mei 2008 memicu angka inflasi mengalami kenaikan pada Juni 2008 mencapai 11,03 (yoy). Hal ini berdampak pada *saving* masyarakat yang sedikit menurun dan menyebabkan peningkatan *loan to deposit ratio* (LDR) yakni dari 88,98% pada akhir triwulan II-2007 menjadi 100,82% pada Juni 2008. Berdasarkan lokasi proyek, LDR perbankan NTB posisi Mei 2008 telah mencapai 112,81%. Hal ini menunjukkan fungsi

intermediasi sudah sangat bagus bahkan melampaui LDR pasca krisis ekonomi semester I- 1997 yang mencapai 109,14%.

Perkembangan aset perbankan NTB sampai dengan triwulan II-2008 mencapai Rp8,40 triliun atau tumbuh 10,87 (ytd) dan secara tahunan sebesar 15,19% (yoy). Sebaliknya pada penghimpunan DPK meningkat hanya sebesar 2,51% (ytd) atau tumbuh 10,05% (yoy) dengan posisi mencapai Rp5,77 triliun. Besarnya tekanan inflasi tersebut berpengaruh pada masyarakat yang menggunakan sebagian savingnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin meningkat dan biaya sekolah.

Di sisi lain, penyaluran kredit sampai Juni 2008 meningkat hingga mencapai Rp5,82 triliun atau tumbuh 24,69% (yoy) meskipun secara ytd baru sebesar 15,16%. Pertumbuhan kredit yang cukup signifikan disebabkan antara lain perbankan mulai menurunkan tingkat suku bunga kredit investasi (dari rata-rata 15,60% pada Juni 2007 menjadi 14,44% pada Juni 2008) dan modal kerja (dari rata-rata 15,93% pada Juni 2007 menjadi 14,22% pada Juni 2008) di samping karena adanya tambahan pembukaan bank yang baru di NTB. Sebaliknya, rasio LDR yang meningkat diikuti dengan perbaikan rasio *non performing loan* (NPL) dari 4,15% pada triwulan II-2007 menjadi 3,41%. Kecenderungan perbankan menyalurkan ke risiko yang lebih rendah (kredit konsumtif) menjadi salah satu penyebabnya disamping langkah-langkah konsolidasi kredit yang dilakukan.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar portofolio kredit perbankan di NTB masih didominasi oleh kredit konsumtif (56,83%) sedangkan untuk kegiatan produktif sebesar 43,17%. Dengan kondisi harga barang kebutuhan pokok dan biaya sekolah yang meningkat serta perkiraan penurunan permintaan masyarakat, perbankan cenderung menyalurkan kredit konsumtif pada triwulan II-2008, mengingat adanya kekhawatiran risiko kredit produktif yang semakin besar.

Penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai secara umum masih dalam kategori lain-lain (sebagian besar untuk konsumsi), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, jasa dunia usaha dan sektor pertanian. Sepanjang triwulan ini, pertumbuhan sektoral tertinggi tercatat di sektor pertambangan sebesar 2.637,45%(yoy), karena ada penambangan batu pasir di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengantisipasi pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL). Diikuti sektor lain-lain (konsumtif) 37,28% (yoy) dan pengangkutan 22,62%(yoy) yang mengalami penurunan pada periode yang sama sektor listrik, gas dan air dan sektor jasa sosial karena masyarakat lebih fokus untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan biaya anak sekolah.

Pangsa kredit UMKM mencapai 97,34% dari total kredit yang disalurkan perbankan di NTB dan pertumbuhannya cenderung lebih tinggi dibandingkan kredit secara total, yang menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki potensi besar untuk diolah dan dimanfaatkan oleh sektor perbankan.

Penyelesaian transaksi non tunai dengan menggunakan sarana RTGS maupun kliring pada triwulan laporan menunjukkan kecenderungan menurun,

meskipun relatif meningkat dibandingkan triwulan I-2008. Secara nominal, transaksi dengan menggunakan RTGS lebih besar dibandingkan dengan transaksi kliring. Selama triwulan II-2008, penyelesaian transaksi BI-RTGS di KBI Mataram mencapai Rp1,211 milyar, sementara melalui sistem kliring tercatat Rp657 milyar.

Perkembangan *inflow* atau aliran uang masuk ke kas Bank Indonesia Mataram pada triwulan II-2008 cenderung menurun dan aliran uang keluar (*outflow*) cenderung meningkat bila dibandingkan triwulan I-2008 maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Ketentuan Bank Indonesia yang membatasi penyetoran uang kartal ke Bank Indonesia hanya untuk uang yang tidak layak edar (UTLE) serta optimalisasi pelaksanaan *cash management* antar bank melalui fokus group telah berjalan dengan efektif. Seperti pada periode tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan II terjadi *net outflow* karena aliran uang masuk (*cash inflow*) lebih kecil dibandingkan aliran uang keluar (*cash outflow*), atau dengan kata lain setoran dari perbankan masih lebih kecil dibandingkan penarikan yang dilakukan oleh perbankan.

2. Prospek Ekonomi Tahun 2008

Prospek Ekonomi

Memasuki triwulan III-2008, perekonomian Nusa Tenggara Barat diperkirakan tetap tumbuh positif ditengah tekanan negatif faktor eksternal dan internal. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III-2008 diperkirakan berada pada kisaran 4,5 – 5,5% (yoy). Faktor eksternal yang berpengaruh negatif adalah kenaikan harga minyak dunia yang terus berlanjut sehingga berdampak pada kenaikan BBM Industri dan dikhawatirkan mendorong kenaikan ongkos produksi di berbagai sektor terutama terkait sektor pertanian dan perdagangan.

Di sisi lain, belum adanya izin pinjam pakai hutan di sektor pertambangan (PT. Newmont Nusa Tenggara) akan berpotensi menimbulkan tekanan negatif pada ekspansi sektor pertambangan dan pada gilirannya menekan angka ekspor NTB. Hanya di sektor pertanian (tabaka dan perkebunan), perdagangan dan konstruksi serta konsistensi ekspansi sektor keuangan yang akan membantu pertumbuhan yang tinggi di triwulan ini.

Prospek Inflasi

Prospek inflasi jangka menengah pada triwulan III-2008 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 10,5-11,5% (yoy). Determinan inflasi dari sisi inflasi komoditas *volatile foods* sangat dipengaruhi keberhasilan kegiatan produksi tanaman bahan pangan di paruh waktu kedua tahun 2008. Sementara dari sisi inflasi inti, diperkirakan tekanan inflasi akan bersumber dari kenaikan permintaan menjelang tibanya bulan suci Ramadhan di triwulan III-2008 dan keberhasilan panen di sektor pertanian. Untuk mitigasi potensi inflasi, diharapkan pihak pemda dan dinas/instansi

terkait dapat melakukan monitoring dan pembinaan agar kegiatan produksi tanaman bahan pangan berjalan baik. Ketersediaan pasokan sangat krusial terutama menjelang tibanya bulan suci Ramadhan.

Dari sisi inflasi *administered price goods*, di tengah terus bergejolaknya harga minyak dunia, diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan energi yang tepat. Kenaikan harga *crude oil* yang terus membenani APBN sebaiknya disikapi pemerintah dengan menyelesaikan kebocoran industri migas dari hulu hingga hilir agar ketergantungan impor minyak Indonesia dapat dikurangi. Sedangkan bagi pemda NTB, perlu terus melakukan koordinasi dan monitoring terhadap distribusi BBM dan gas elpiji serta pelaksanaan konversi minyak tanah ke energi lainnya. Apabila realisasinya masih jauh dari yang diharapkan, maka koordinasi dengan pemerintah pusat serta pertanian perlu diupayakan terhadap ketersediaan kebutuhan akan minyak tanah di daerah Lombok khususnya untuk perkebunan tembakau. Saat ini pasokan minyak tanah cenderung berkurang, sehingga dikhawatirkan petani tembakau akan membeli minyak tanah meskipun harganya jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan.

BAB 1

MAKRO EKONOMI REGIONAL NUSA TENGGARA BARAT

1.1 KONDISI UMUM

Ditengah berbagai tekanan eksternal dan internal, perekonomian Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2008 diperkirakan tumbuh melambat. Pertumbuhan ekonomi NTB pada periode ini tercatat sebesar 3,65% (yoy) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,83% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi secara konsisten masih ditopang oleh kegiatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan. Sementara itu, ditengah perlambatan pertumbuhan di beberapa kelompok permintaan, kegiatan investasi fisik justru mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan II-2008. Di sisi produksi, perlambatan juga tercermin dari kinerja sektor-sektor andalan, yakni sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan, hotel & restoran (PHR). Namun demikian, sejalan dengan peningkatan kegiatan investasi fisik seperti konstruksi perumahan dan pertokoan, sektor bangunan tercatat mengalami percepatan pertumbuhan dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di NTB.

Daya beli masyarakat secara umum mengalami tekanan dari tren kenaikan harga barang dan jasa pada triwulan II-2008. Konsumsi rumah tangga pada periode ini tercatat tumbuh sebesar 2,76% (yoy) melambat dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu sebesar 4,84% (yoy). Konsumsi rumah tangga yang mayoritas berpenghasilan tetap tertolong oleh penyaluran gaji ke-13 para pegawai negeri sipil (PNS) di bulan Juni 2008. Selain itu, peningkatan kredit konsumsi yang terus menunjukkan tren pada triwulan II-2008 juga diperkirakan menjadi tambahan sumber pembiayaan konsumsi rumah tangga untuk mengimbangi penurunan daya beli akibat lonjakan inflasi pada triwulan ini.

Di sisi penawaran, ditengah melambatnya pertumbuhan sektor-sektor andalan, sektor bangunan tercatat mengalami percepatan pertumbuhan di triwulan II-2008. Makin tingginya kegiatan pembangunan di sektor properti terutama pembangunan rumah toko (ruko) serta bertambahnya kegiatan usaha di sejumlah ruko baru di Kota Mataram, membuat sektor bangunan mampu tumbuh sebesar 20,82% (yoy) tertinggi sepanjang satu tahun terakhir dengan andil sebesar 1,30% (yoy) dari agregat pertumbuhan ekonomi NTB. Pertumbuhan di sisi penawaran berikutnya bersumber dari sektor pertanian yang tumbuh melambat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2

Pertumbuhan Sisi Permintaan Nusa Tenggara Barat

Uraian	2006	2007				2008		
	FY	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	FY	Tw.I	Tw.II
Konsumsi Rumah Tangga	6.29	11.05	10.09	8.74	10.48	10.08	4.85	5.48
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	7.82	7.66	7.38	4.87	6.40	6.55	7.94	8.03
Konsumsi Pemerintah	4.83	4.86	5.58	5.85	12.75	7.29	5.72	5.89
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.70	7.88	4.68	3.94	18.45	8.81	15.45	16.98
Perubahan Stok	31.26	(66.40)	(10.93)	(30.81)	40.06	(36.21)	(18.15)	(33.09)
Ekspor	(8.16)	15.47	(0.26)	2.49	(11.79)	(0.19)	2.37	(0.41)
Impor	5.24	5.65	4.64	3.34	6.78	5.12	6.45	7.90
Produk Domestik Bruto	2.37	5.05	4.83	2.77	6.04	4.62	5.86	3.65

Sumbangan Pertumbuhan Sisi Permintaan Nusa Tenggara Barat

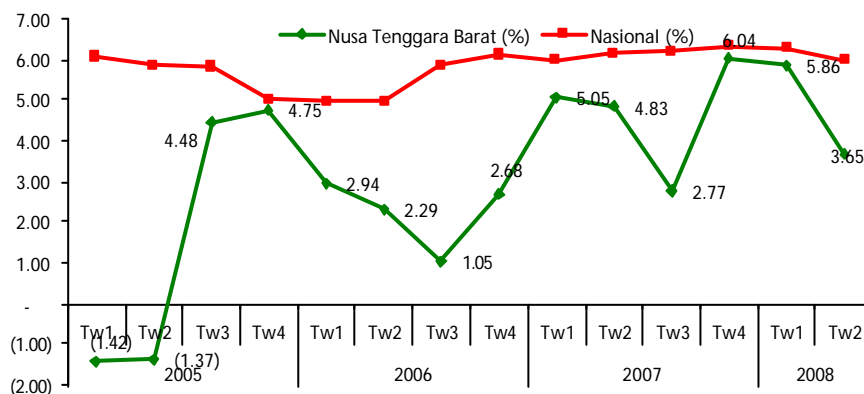
Uraian	2006	2007				2008		
	FY	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	FY	Tw.I	Tw.II
Konsumsi Rumah Tangga	2.87	5.67	4.84	3.78	5.05	4.79	2.63	2.76
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.08	0.08	0.08	0.05	0.07	0.07	0.09	0.08
Konsumsi Pemerintah	0.64	0.73	0.77	0.72	1.70	0.99	0.85	0.82
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.39	1.90	1.11	1.05	4.80	2.22	3.82	4.01
Perubahan Stok	1.44	(5.86)	(0.79)	(2.83)	0.53	(2.14)	(0.51)	(2.03)
Ekspor	(2.82)	4.01	(0.08)	0.74	(4.43)	(0.06)	0.68	(0.12)
Impor	(1.23)	(1.48)	(1.10)	(0.74)	(1.68)	(1.23)	(1.70)	(1.87)
Produk Domestik Bruto	2.37	5.05	4.83	2.77	6.04	4.62	5.86	3.65

Sumber: BPS, diolah

1.2 SISI PERMINTAAN

Seperti beberapa periode sebelumnya, kegiatan konsumsi masih memegang andil yang besar pada pertumbuhan ekonomi di sisi permintaan. Kegiatan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2008 memberi kontribusi sebesar 3,66% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Selain itu, membaiknya iklim investasi di NTB telah berdampak pada peningkatan kegiatan investasi yang tercermin dari tingginya pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada triwulan ini.

Grafik 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS, diolah

a. Konsumsi

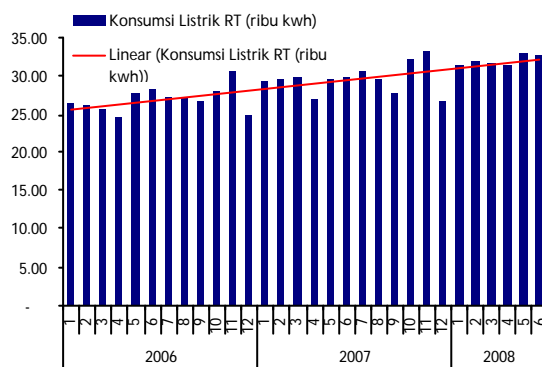
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pada triwulan II-2008 kegiatan konsumsi tercatat tumbuh melambat sebesar 2,76%(yoy). Tekanan pada kegiatan konsumsi tercermin dari indikator konsumsi listrik rumah tangga yang tumbuh

melambat pada triwulan ini. Perlambatan tersebut dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat berpenghasilan tetap yang mendominasi kegiatan konsumsi rumah tangga. Melemahnya daya beli masyarakat terkonfirmasi dari indikator indeks ekspektasi penghasilan yang relatif stabil. Penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa sepanjang triwulan ini sedikit terkompensasi dengan adanya penyaluran gaji ke-13 PNS pada bulan Juni 2008.

Selain itu, untuk membiayai kegiatan konsumsi, masyarakat juga mengandalkan sumber pembiayaan lain seperti kredit konsumsi perbankan maupun jasa pembiayaan seperti pegadaian, koperasi dan perusahaan pembiayaan non bank. Hal tersebut tercermin dari tren peningkatan pertumbuhan kredit konsumsi sepanjang triwulan II-2008 mencapai 36,49%(yoy).

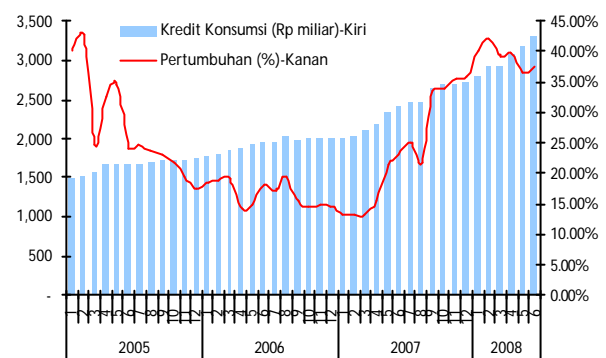
Kegiatan konsumsi rumah tangga diperkirakan lebih terkonsentrasi pada konsumsi kebutuhan pokok dibandingkan untuk konsumsi barang tahan lama. Preferensi konsumsi tersebut dikonfirmasi indikator indeks ekspektasi pembelian barang tahan lama yang menurun pada level pesimis (level moderat :100) dengan indeks sebesar 61,50 pada bulan Juni 2008.

Grafik 1.2 Konsumsi Listrik RT



Sumber: PLN

Grafik 1.3 Kredit Konsumsi



Sumber: BI

b. Investasi

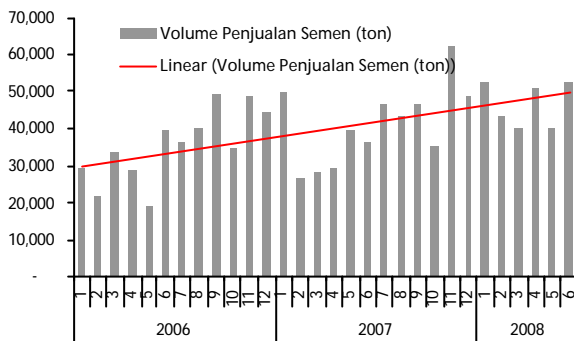
Kondisi sosial politik yang relatif kondusif sejak beberapa triwulan terakhir ini membuat kegiatan investasi di Nusa Tenggara Barat mengalami perbaikan. Kegiatan kampanye Pilkada Gubernur NTB yang berlangsung aman juga turut mendukung pertumbuhan kegiatan investasi di Nusa Tenggara Barat. Investasi fisik yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto pada triwulan II-2008 tercatat mengalami lonjakan pertumbuhan mencapai 16,98% (yoy) dengan andil terhadap agregat pertumbuhan NTB sebesar 4,01% (yoy).

Mulai membaiknya kegiatan investasi fisik di Nusa Tenggara Barat tercermin dari beberapa indikator seperti peningkatan volume penjualan semen, dan peningkatan nilai impor barang modal sepanjang triwulan II-2008. Volume penjualan semen periode April-Juni 2008 tercatat sebesar 143,9 ribu ton meningkat 37,14%

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara nilai impor barang modal periode April-Mei 2008 tercatat sebesar USD5,39 juta meningkat dibandingkan nilai impor barang modal pada Januari-Maret 2008 sebesar USD3,43 juta.

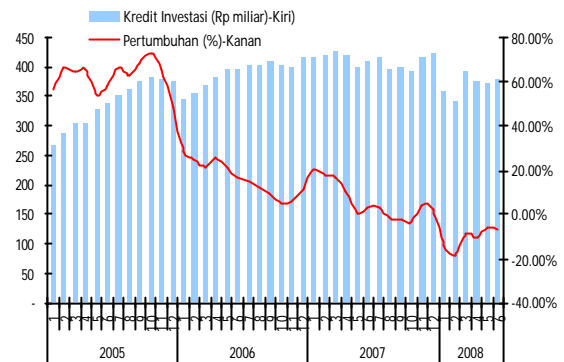
Dari sisi pembiayaan, kredit investasi yang mengalami kontraksi pertumbuhan tahunan terus menunjukkan perbaikan sejalan dengan perbaikan kegiatan investasi di Nusa Tenggara Barat. Setelah menyentuh titik terendah pertumbuhan sebesar -18,67% (yoy) di bulan Februari 2008, pertumbuhan kredit investasi terkoreksi mencapai angka -6,59% (yoy) di bulan Juni 2008.

Grafik 1.4 Volume Penjualan Semen



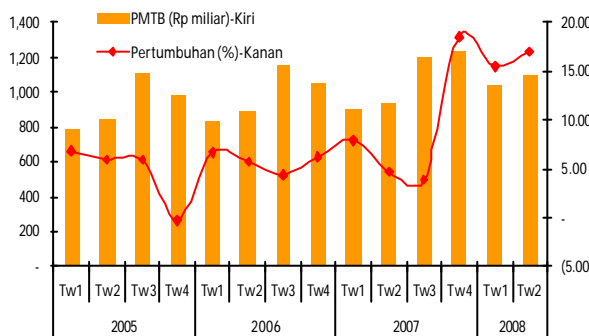
Sumber: ASI

Grafik 1.5 Kredit Investasi



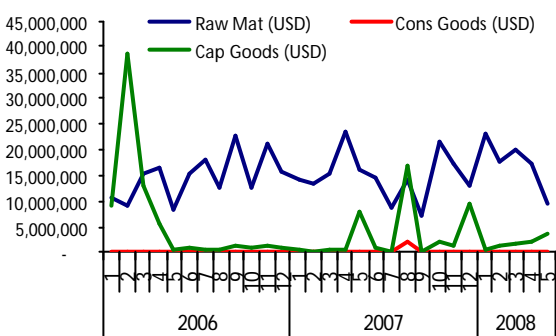
Sumber: BI

Grafik 1.6 Perkembangan PMTB



Sumber: BPS

Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor



Sumber: BI

c. Ekspor Impor

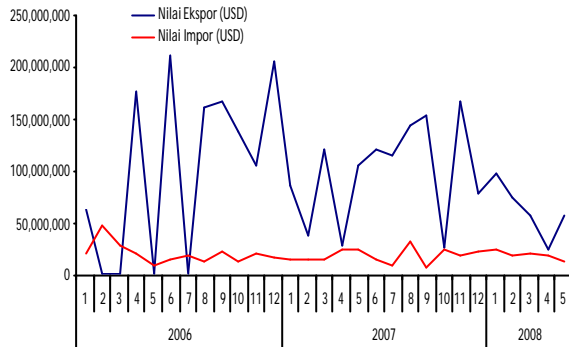
Pada triwulan II-2008, kegiatan ekspor Tenggara Barat menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kegiatan ekspor tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,41% (yoy) sementara kegiatan impor mengalami pertumbuhan mencapai 7,90% (yoy).

Kegiatan ekspor yang didominasi konsentrat tembaga produksi Newmont Nusa Tenggara mengalami tekanan dari faktor perizinan lahan pinjam pakai. Hingga akhir triwulan II-2008, Newmont belum mendapatkan izin lahan pinjam pakai seluas 32 hektar yang diperlukan untuk *waste dumping* kegiatan ekspansi eksplorasi tambang.

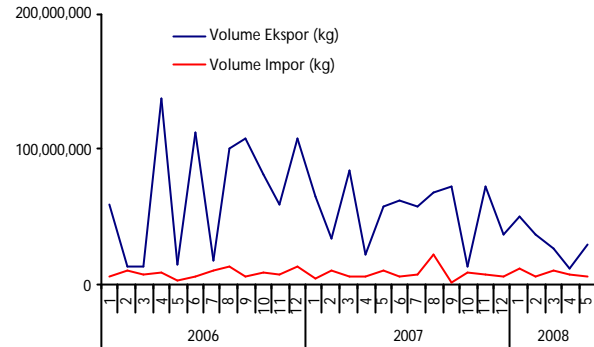
Di sisi lain, kegiatan impor terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang triwulan II-2008. Komoditas impor didominasi mesin dan peralatan untuk industri tertentu serta bahan baku baja dan karet untuk kegiatan industri, utamanya untuk

kegiatan penambangan. Peningkatan nilai impor turut dipengaruhi penguatan nilai rupiah sepanjang triwulan II-2008 sehingga para pelaku usaha memandang periode tersebut sebagai saat yang tepat untuk melakukan impor barang untuk kebutuhan produksi.

Grafik 1.8 Perkembangan Nilai Eksim



Grafik 1.9 Perkembangan Volume Eksim



Sumber: BI

Tabel 1.3

Komoditas Ekspor Terbesar NTB (USD)

No	Komoditas	FY 2007	Tw II-2007	Tw II-2008	Pangsa (%)
1	METALLIFEROUS ORES&METAL SCR	1,183,209,870	133,159,052	79,579,555	97.30
2	NON METALIC MINERALS MFS	2,843,402	822,938	1,295,167	1.58
3	FISH,CRUST.,MOLLUSES AND THEIR PRE	417,202	112,510	725,743	0.89
4	FRUITS AND VEGETABLES	634,143	39,622	99,054	0.12
5	ELECTRICAL MACH., APPARATUS	6,347	-	32,000	0.04
6	CRD.FERTILIZERS&CRD.MINERALS	2,731,673	493,868	27,513	0.03
7	CRD.ANIMAL&VEGETABLE MAT,NES	918,527	132,185	26,309	0.03
8	WOOD AND CORK MANUFACTURES	257,460	70,136	4,479	0.01
9	TEXTILE FIBRES & THEIR WASTE	17,712	705	460	0.00
10	OTHER	1,476,530	111,771	965	0.00
Total		1,192,512,866	134,942,787	81,791,245	100.00

Sumber: BI

Tabel 1.4

Komoditas Impor Terbesar NTB (USD)

No	Komoditas	FY 2007	Tw II-2007	Tw II-2008	Pangsa (%)
1	MACH.SPECIAL FOR PARTIC.INDS	68,999,611	16,437,810	10,745,347	33.34
2	GENERAL INDUSTRIAL MACH.&EQP	27,405,483	3,940,950	6,106,552	18.95
3	MANUFACTURES OF METAL NES	33,126,387	5,061,216	5,819,233	18.06
4	RUBBER MANUFACTURES NES	33,594,436	10,110,635	2,893,133	8.98
5	FERTILIZERS MANUFACTURED	13,011,806	2,890,604	2,446,164	7.59
6	ELECTRICAL MACH., APPARATUS	2,757,691	565,998	834,580	2.59
7	INORGANIC CHEMICALS	1,499,895	628,002	825,633	2.56
8	ROAD VEHICLES	4,707,189	1,906,174	630,380	1.96
9	IRON AND STEEL	9,229,710	1,760,392	477,685	1.48
10	OTHER	30,499,143	5,560,983	1,451,596	4.50
Total		224,831,351	48,862,764	32,230,303	100.00

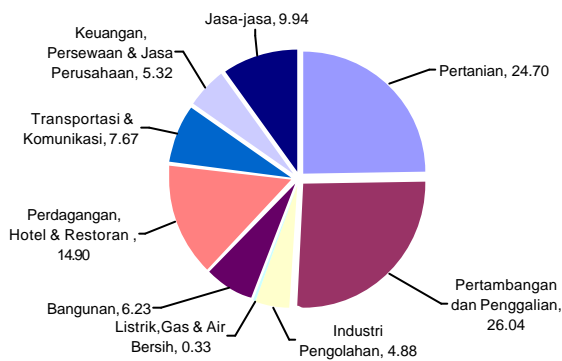
Sumber: BI

1.3 SISI PENAWARAN

Struktur perekonomian Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2008 masih didominasi sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dengan total pangsa mencapai 64,46%. Namun demikian, porsi sektor bangunan mulai menunjukkan kenaikan pada triwulan II-2008 mencapai 7,26% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,23%. Akibatnya dominasi ketiga sektor di atas sedikit menurun dibandingkan pangsa pada triwulan II-2007 sebesar 65,64%.

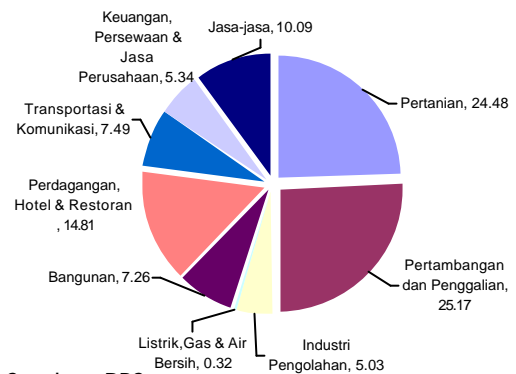
Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2008 tercatat mengalami perlambatan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu mencapai angka 3,65% (yoy). Perlambatan tersebut bersumber dari penurunan kinerja sektor pertambangan yang merupakan salah satu sektor utama perekonomian Nusa Tenggara Barat.

Grafik 1.10 Struktur Ekonomi Tw2-07



Sumber: BPS

Grafik 1.11 Struktur Ekonomi Tw2-08



Sumber: BPS

Tabel 1.5 dan Tabel 1.6

Pertumbuhan Sisi Penawaran Nusa Tenggara Barat

Uraian	2006		2007				2008		
	FY	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	FY	Tw.I	Tw.II	
Pertanian	2.86	(2.15)	7.60	(0.84)	4.58	2.12	2.26	2.73	
Pertambangan dan Penggalian	(2.88)	6.10	(0.02)	3.72	1.66	2.76	5.06	0.21	
Industri Pengolahan	2.82	11.17	10.87	10.33	7.85	9.96	12.24	7.03	
Listrik, Gas & Air Bersih	10.42	12.02	9.40	12.80	3.25	9.17	9.71	1.78	
Bangunan	6.45	25.53	0.64	(8.08)	16.37	7.59	13.58	20.82	
Perdagangan, Hotel & Restoran	5.76	6.58	7.57	6.35	10.74	7.90	9.26	3.02	
Transportasi & Komunikasi	4.85	4.36	6.15	6.96	6.36	5.99	8.25	1.27	
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusat	9.48	7.90	13.67	16.43	15.20	13.29	3.78	3.99	
Jasa-jasa	2.83	1.02	1.90	1.53	1.56	1.50	1.92	5.24	
Produk Domestik Bruto	2.37	5.05	4.83	2.77	6.04	4.62	5.86	3.65	

Sumbangan Pertumbuhan Sisi Penawaran Nusat Tenggara Barat

Uraian	2006		2007				2008		
	FY	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	FY	Tw.I	Tw.II	
Pertanian	0.73	(0.53)	1.83	(0.24)	1.11	0.54	0.52	0.67	
Pertambangan dan Penggalian	(0.80)	1.56	(0.00)	0.95	0.44	0.72	1.31	0.05	
Industri Pengolahan	0.13	0.49	0.50	0.43	0.38	0.45	0.57	0.34	
Listrik, Gas & Air Bersih	0.03	0.04	0.03	0.04	0.01	0.03	0.04	0.01	
Bangunan	0.43	1.69	0.04	(0.58)	1.15	0.52	1.08	1.30	
Perdagangan, Hotel & Restoran	0.78	0.90	1.10	0.84	1.58	1.11	1.28	0.45	
Transportasi & Komunikasi	0.35	0.34	0.47	0.48	0.49	0.45	0.64	0.10	
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusat	0.43	0.44	0.67	0.72	0.73	0.65	0.21	0.21	
Jasa-jasa	0.28	0.12	0.19	0.14	0.15	0.15	0.21	0.52	
Produk Domestik Bruto	2.37	5.05	4.83	2.77	6.04	4.62	5.86	3.65	

Sumber: BPS, diolah

a. Pertanian

Kinerja sektor pertanian pada triwulan II-2008 tercatat sebesar 2,73% (yoy) melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan di sektor pertanian pada triwulan ini masih didominasi kegiatan produksi tanaman bahan makanan yakni tanaman padi. Panen raya pertama tanaman padi yang jatuh pada bulan Maret hingga April 2008 berjalan baik dengan tidak adanya kendala cuaca maupun serangan hama. Selain itu, kegiatan panen kedelai pada bulan Juni 2008 turut mendorong pertumbuhan di sektor pertanian pada triwulan II-2008. Dari sisi pembiayaan, tren positif pertumbuhan kinerja sektor pertanian dikonfirmasi oleh indikator pertumbuhan kredit pertanian yang terus meningkat hingga akhir triwulan II-2008.

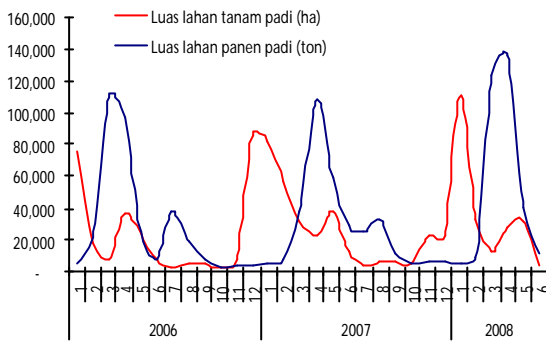
Perlambatan pertumbuhan di sektor pertanian pada triwulan ini diperkirakan disebabkan oleh tibanya musim kemarau yang tiba lebih awal di pertengahan triwulan II-2008 sehingga sejumlah lahan tanam padi dalam skala relatif kecil terancam puso karena keterbatasan pengairan. Hal tersebut terindikasi dari luas lahan tanam yang melebihi kapasitas irigasi, untuk wilayah Lombok Tengah tercatat luas lahan tanam sebanyak 19 ribu hektar sementara debit air yang ada hanya mampu mengairi 12 ribu hektar sehingga 7 hektar lahan terancam puso.

Namun demikian, dampak dari pergeseran musim kemarau yang berdampak pada peningkatan lahan puso dapat dikompensasi penerapan pola penanaman padi SRI (*system of rice intensification*) di NTB. Pola penanaman padi SRI tersebut mampu meningkatkan produktivitas lahan padi dari 4 ton per hektar menjadi 6 ton per hektar. Hal tersebut tercermin dari indikasi peningkatan hasil panen padi di pertengahan April 2008. Dari target produksi padi tahun 2008 sebanyak 1.723.991 ton gabah kering giling (GKG) telah tercapai sebanyak 1.231.009 ton GKG hingga Juni 2008. Diharapkan kurang lebih tambahan 500 ribu ton GKG dapat diperoleh dari panen padi hingga akhir tahun 2008.

Lebih lanjut, untuk terus mendorong keberhasilan produksi tanaman bahan pangan di NTB pada tahun 2008, pemerintah daerah telah mulai memberikan subsidi benih padi sebanyak 25 kg benih per hektar lahan tanam. Lahan tanam tersebut terdiri dari 355 ribu hektar lahan tanam padi, 55 ribu hektar lahan tanam jagung, dan 23 ribu hektar lahan tanam kedelai.

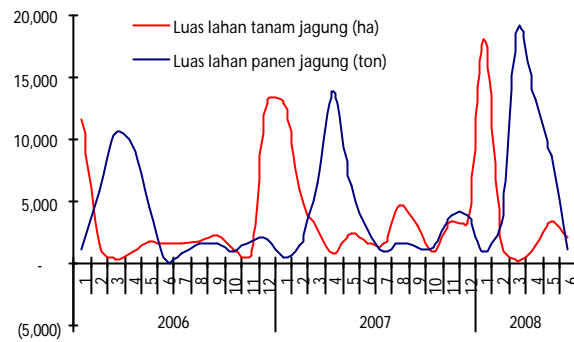
Secara regional, volume produksi padi di Nusa Tenggara Barat masih lebih baik dibandingkan daerah sekitarnya yakni Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut angka ramalan I tahun 2008 Badan Pusat Statistik, produksi padi di Nusa Tenggara Barat untuk periode II April-Agustus 2008 tercatat sebesar 552 ribu ton, sementara di Bali dan Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 266 ribu ton dan 279 ribu ton.

Grafik 1.12 Luas Lahan Padi



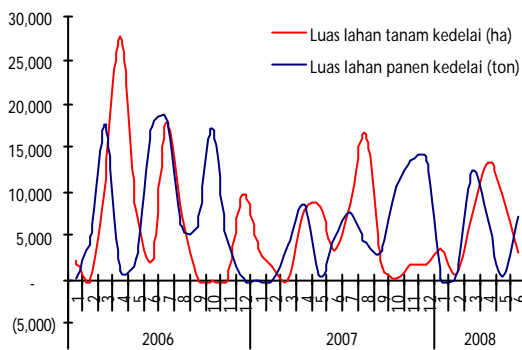
Sumber: Distan

Grafik 1.13 Luas Lahan Jagung



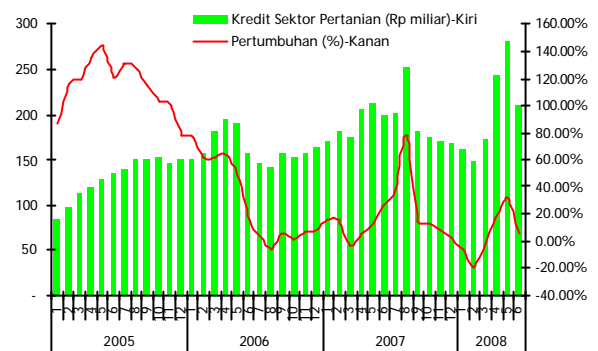
Sumber: Distan

Grafik 1.14 Luas Lahan Kedelai



Sumber: Distan

Grafik 1.15 Kredit Pertanian



Sumber: BI

Tabel 1.7 dan Tabel 1.8

Tabel Produksi Padi Tahun 2007 (Angka Sementara 2007)

Propinsi	Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember		Januari - Desember	
	Luas Panen(Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen(Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen(Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen(Ha)	Produksi (Ton)
B a l i	46,915	268,214	49,161	277,612	48,954	293,949	145,030	839,775
Nusa Tenggara Barat	157,349	712,712	145,974	677,103	28,593	136,532	331,916	1,526,347
Nusa Tenggara Timur	47,078	122,840	91,088	285,564	28,278	96,173	166,444	504,577
Indonesia	4,893,100	22,312,993	4,603,998	22,043,062	2,627,729	12,695,624	12,124,827	57,051,679

Tabel Produksi Padi Tahun 2008 (Angka Ramalan I 2008)

Propinsi	Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember		Januari - Desember	
	Luas Panen(Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen(Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen(Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen(Ha)	Produksi (Ton)
B a l i	48,636	279,294	45,687	266,858	47,268	276,191	141,591	822,343
Nusa Tenggara Barat	190,519	876,962	117,714	552,386	23,782	113,440	332,015	1,542,788
Nusa Tenggara Timur	65,166	159,284	86,405	279,596	26,903	91,551	178,474	530,431
Indonesia	5,522,122	25,709,389	4,299,341	20,715,027	2,477,928	11,844,380	12,299,391	58,268,796

Sumber: BPS

b. Pertambangan

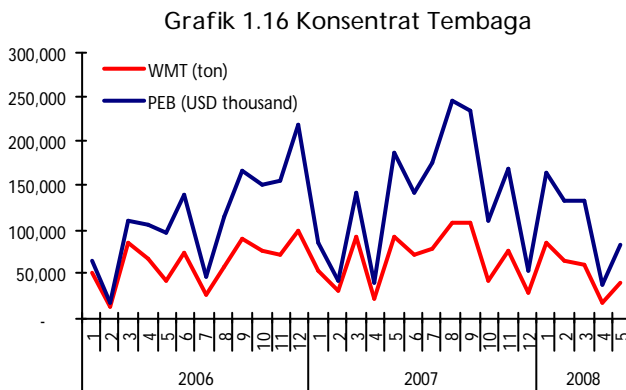
Pada triwulan II-2008 ini sektor pertambangan menunjukkan perlambatan kinerja dengan tumbuh sebesar 0,21% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,06%

(yoy). Minimnya angka pertumbuhan tersebut berdampak pada kecilnya sumbangan sektor pertambangan pada agregat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat yakni hanya sebesar 0,05% (yoy) walaupun pangsa sektor pertambangan masih relatif yang terbesar dengan angka 25,17%.

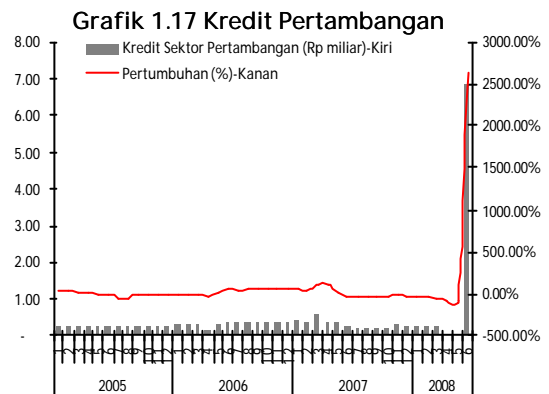
Rendahnya pertumbuhan di sektor pertambangan yang didominasi kegiatan produksi tembaga Newmont Nusa Tenggara disebabkan terhambatnya kegiatan ekspansi tambang tembaga Newmont di Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini Newmont Nusa Tenggara masih menunggu izin hutan pinjam pakai untuk areal seluas 32 hektar untuk area *waste dumping*. Area tersebut diperlukan agar kegiatan penambangan dapat dilanjutkan pada fase berikutnya. Dengan terkendalanya perizinan tersebut, maka kegiatan produksi konsentrat tembaga hanya mengandalkan sisa *stock pile* dengan kualitas *sub prime*.

Melambatnya pertumbuhan global akibat kenaikan harga minyak dunia diperkirakan akan turut berimbas pada kinerja pertambangan seiring menurunnya permintaan dunia atas komoditas tambang untuk bahan baku industri. Berkurangnya permintaan tersebut telah menyebabkan turunnya harga komoditas tembaga di *London Metal Exchange* pada kisaran 9-10% per akhir triwulan II-2008.

Di sisi pembiayaan, terjadi lonjakan pertumbuhan penyaluran kredit untuk sektor pertambangan pada akhir Juni 2008. Penyaluran kredit baru pada kisaran Rp6 miliar tersebut ditujukan bagi kegiatan penambangan pasir di Lombok Tengah untuk mengantisipasi kebutuhan bahan baku pembangunan infrastruktur Bandara Internasional Lombok Tengah.



Sumber: Newmont



Sumber: BI

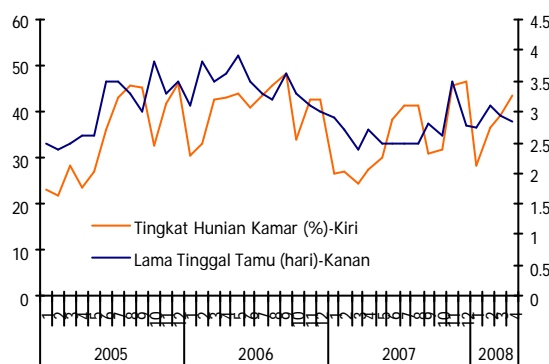
c. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) tetap tumbuh positif sebesar 3,02% (yoy) pada triwulan II-2008. Namun demikian, pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7,57% (yoy). Sektor PHR yang didominasi kegiatan perdagangan besar dan eceran yang terkonsentrasi di Kota Mataram diperkirakan sudah mulai mencapai titik kulminasi dengan semakin banyaknya ruko yang beroperasi di Kota Mataram.

Di sisi lain, pertumbuhan di sektor PHR juga dipengaruhi meningkatnya pertumbuhan di subsektor hotel dan restoran. Tibanya musim liburan sekolah pada triwulan II-2008 telah mendorong kenaikan tingkat hunian hotel berbintang di Nusa Tenggara Barat mencapai kisaran 43,63% menurut hasil survei BPS pada awal triwulan II-2008 dan diperkirakan akan terus meningkat.

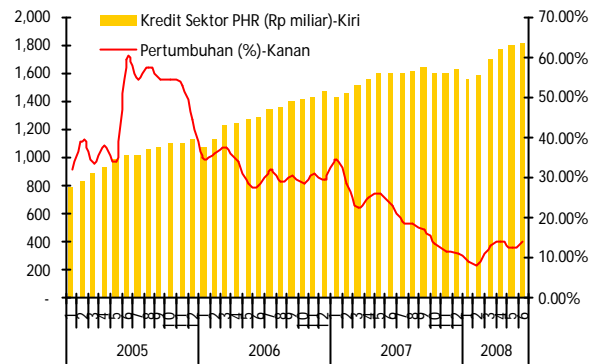
Pertumbuhan positif di subsektor hotel juga dikonfirmasi lonjakan penumpang pesawat terbang yang masuk ke Nusa Tenggara Barat pada periode Mei hingga Juni 2008. *Load factor* untuk Garuda Indonesia dengan rute Jakarta-Mataram pada bulan Mei hingga Juni 2008 mencapai 89% sementara untuk bulan-bulan sebelumnya berada pada kisaran 60-70%.

Grafik 1.18 Tingkat Hunian Kamar



Sumber: BPS

Grafik 1.19 Kredit Sektor PHR



Sumber: BI

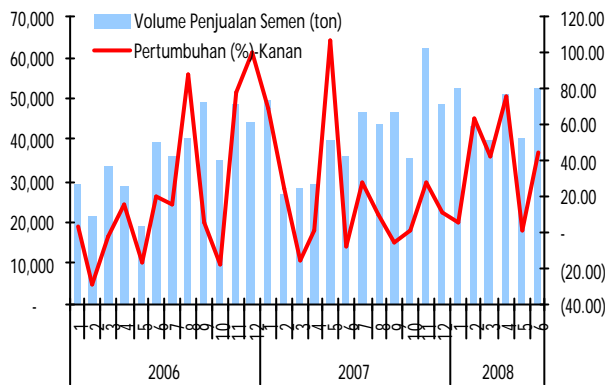
d. Bangunan

Lonjakan pertumbuhan terjadi di sektor bangunan pada triwulan II-2008 dengan angka pertumbuhan mencapai 20,82% (yoy). Percepatan pertumbuhan di sektor bangunan telah memberi sumbangan terbesar mencapai 1,30% (yoy) pada pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Tingginya pertumbuhan di sektor bangunan dikonfirmasi indikator volume penjualan semen di Nusa Tenggara Barat yang mengalami lonjakan penjualan di bulan Juni 2008.

Dari sisi pembiayaan, jumlah kredit perbankan untuk sektor konstruksi terus menunjukkan tren perbaikan. Peningkatan kredit sektor konstruksi sejalan dengan makin banyaknya pembangunan pertokoan maupun perumahan yang masih terkonsentrasi di Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan maupun pusat bisnis di Nusa Tenggara Barat.

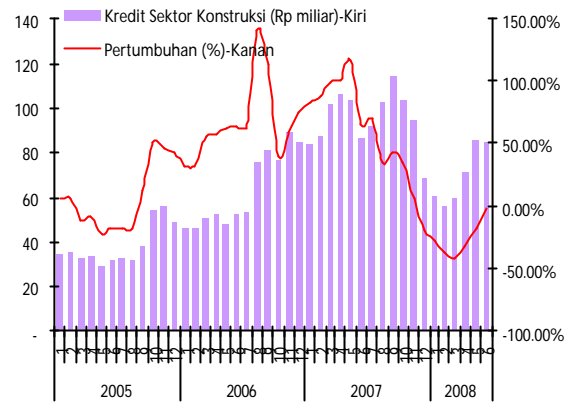
Namun demikian, masih terbatasnya kapasitas daya listrik di Nusa Tenggara Barat membuat pembangunan di sub sektor perumahan/properti terkendala. Penambahan kapasitas listrik sekitar 3 x 25 MW di daerah Jeranjang, Lombok Barat diperkirakan baru akan terealisasi pada tahun 2009.

Grafik 1.20 Volume Penjualan Semen



Sumber: ASI

Grafik 1.21 Kredit Konstruksi



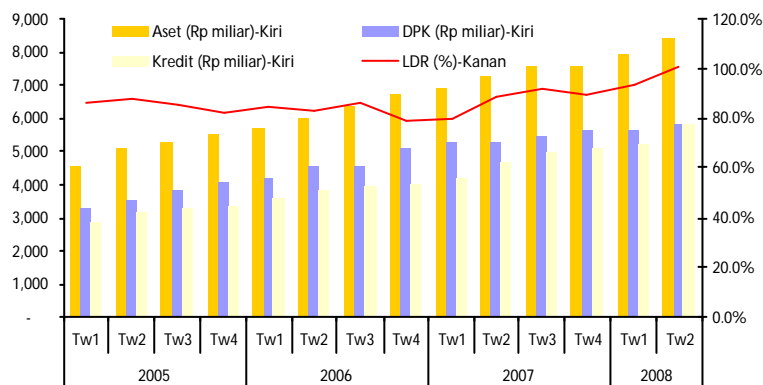
Sumber: BI

e. Keuangan, Persewaan dan Jasa

Sejalan dengan perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat, sektor keuangan, persewaan dan jasa terus tumbuh stabil pada triwulan ini. Sektor keuangan tumbuh 3,99% (yoy) pada triwulan II-2008 sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Stabilnya pertumbuhan di sektor keuangan ditunjang kinerja positif sektor perbankan sepanjang triwulan II-2008. Berbagai indikator utama perbankan menunjukan trend pertumbuhan positif pada triwulan ini. Penyaluran kredit perbankan meningkat sebesar 24,69% (yoy) mencapai Rp5,82 triliun per akhir Juni 2008. Peningkatan kredit tersebut diikuti juga peningkatan rasio kredit macet (NPL) mencapai 3,41%, namun angka tersebut masih relatif moderat di bawah 5%. Lebih lanjut, laba sebelum pajak perbankan di Nusa Tenggara Barat per Juni 2008 tercatat sebesar Rp227 miliar, lebih baik dibandingkan posisi Juni 2007 yakni Rp166 miliar.

Grafik 1.22 Perkembangan Perbankan



Sumber: BI

Tabel 1.9

Tabel Perkembangan Laba Perbankan di Nusa Tenggara Barat

	Tw4-06	Tw1-07	Tw2-07	Tw3-07	Tw4-07	Tw1-08	Tw2-08
Labanya Sebelum Pajak	310,071	85,683	166,237	269,959	336,561	95,646	227,981
Bank Umum	290,290	79,772	155,671	244,061	338,071	96,556	210,469
BPR	19,781	5,911	10,566	25,898	(1,510)	(910)	17,512

Sumber: BI

f. Transportasi dan Komunikasi

Sektor transportasi dan komunikasi mampu tumbuh positif sebesar 1,27% (yoy) walaupun mengalami tekanan pada triwulan ini. Kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada peningkatan biaya bahan bakar pesawat membuat pertumbuhan di subsektor transportasi udara mengalami perlambatan. Di sisi lain, persaingan tarif operator jasa telepon seluler juga membuat subsektor komunikasi tumbuh melambat.

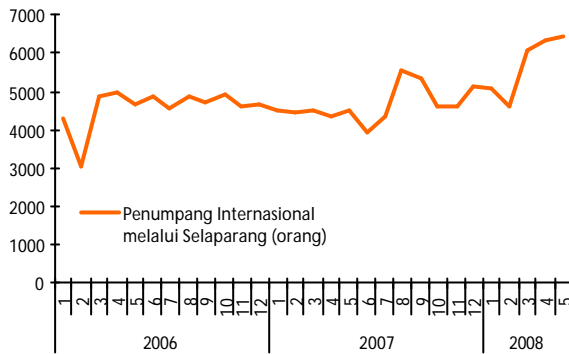
Kinerja sektor transportasi sepanjang triwulan II-2008 ditunjang peningkatan volume penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara. Tibanya musim liburan pada triwulan ini berdampak positif pada peningkatan aktivitas transportasi udara yang diindikasikan dari peningkatan *load factor* maskapai penerbangan nasional yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. *Load factor* untuk Garuda Indonesia dengan rute Jakarta-Mataram pada bulan Mei hingga Juni 2008 meningkat mencapai 89% sementara untuk bulan-bulan sebelumnya berada pada kisaran 60-70%.

Di sisi lain, pertumbuhan di sektor transportasi juga ditunjang inisiatif pemerintah daerah melalui program subsidi tarif penerbangan yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Untuk tahun 2008, pihak pemda telah menandatangani memorandum kesepahaman (MoU) dengan maskapai penerbangan TransNusa untuk melayani rute penerbangan bersubsidi dari Kota Mataram di Pulau Lombok ke Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima di Pulau Sumbawa.

Untuk transportasi darat, Dinas Kimpraswil pada tahun 2008 tengah memfokuskan kegiatan pada pengembangan jalan skala provinsi di lingkaran selatan Pulau Sumbawa dengan menggunakan anggaran tambahan bantuan dari negara donor Jepang melalui institusi JICA (Japan Indonesian Cooperation Agency). Namun demikian, kemajuan proyek pembangunan tersebut hingga Juni 2008 baru mencapai kisaran 10%.

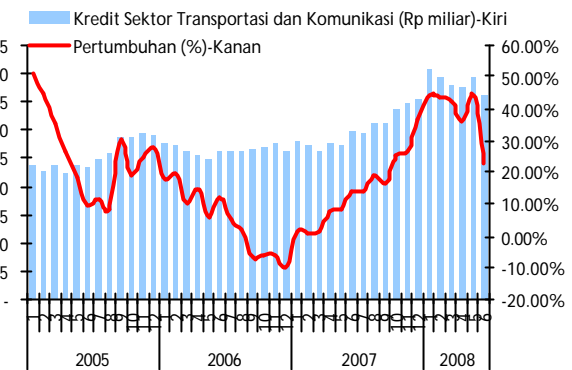
Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan di sektor transportasi dan komunikasi sempat diikuti perbaikan pertumbuhan kredit perbankan ke sektor transportasi dan komunikasi pada pertengahan triwulan II-2008. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan di sektor transportasi dan komunikasi juga ditunjang oleh pembiayaan perbankan yang terus menunjukkan perbaikan fungsi intermediasi. Namun, pasca kenaikan harga BBM yang berdampak buruk pada sektor transportasi membuat pihak perbankan lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit ke sektor tersebut.

Grafik 1.23 Penumpang Internasional



Sumber: Dishub

Grafik 1.24 Kredit Sektor Transportasi



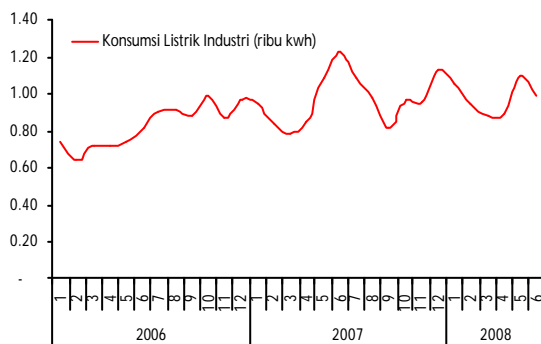
Sumber: BI

g. Industri Pengolahan

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada triwulan ini menunjukkan perlambatan. Sektor industri pengolahan tumbuh 7,03% (yoy) lebih lambat dibandingkan triwulan II-2007 yang mencapai 10,87% (yoy). Menurunnya akselerasi pertumbuhan di sektor industri pengolahan juga dikonfirmasi penurunan utilisasi kapasitas produksi industri pengolahan sepanjang triwulan II-2008. Hasil survei yang dilakukan BI Mataram pada triwulan II-2008 menunjukkan bahwa rata-rata utilisasi kapasitas produksi di industri pengolahan berada pada kisaran 48,33% menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 75,50%.

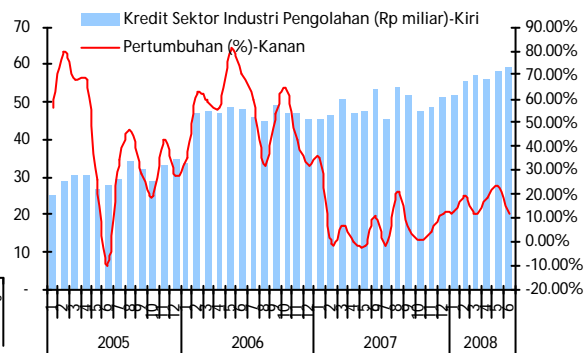
Di sisi lain, indikator konsumsi listrik industri juga menunjukkan tren penurunan pada triwulan ini. Pemakaian listrik pada periode April-Juni 2008 tercatat sebesar 2,98 ribu kwh lebih rendah dibandingkan periode April-Juni 2007 yang mencapai 3,16 ribu kwh.

Grafik 1.25 Konsumsi Listrik Industri



Sumber: PLN

Grafik 1.26 Kredit Sektor Industri Pengolahan



Sumber: BI

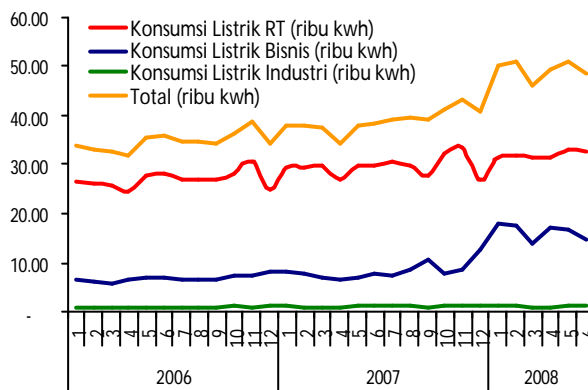
h. Listrik, Gas dan Air Bersih

Pada triwulan II-2008, sektor listrik, gas dan air bersih (LGA) tumbuh jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor LGA

pada triwulan ini hanya sebesar 1,78% (yoy) menurun signifikan dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2007 sebesar 9,40% (yoy). Rendahnya pertumbuhan di sektor LGA diperkirakan akibat berbagai faktor tekanan eksternal dan internal.

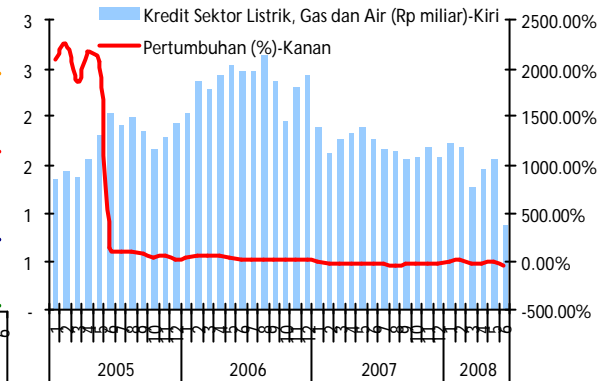
Belum adanya penambahan kapasitas listrik untuk memenuhi peningkatan kebutuhan listrik di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan sektor LGA. Pihak PLN Divisi Regional NTB bersama instansi terkait lainnya saat ini tengah berupaya menambah daya listrik melalui sejumlah program investasi infrastruktur listrik yang meliputi pembangunan PLTD MFO dengan kapasitas 15 MW (target operasi tahun 2008), pembangunan PLTU di Lombok Barat dengan kapasitas 3x25 MW (target operasi tahun 2010) serta pembangunan PLTU di Bima dengan kapasitas 2x10 MW dan 2x7 MW (target operasi tahun 2010).

Grafik 1.28 Konsumsi Listrik



Sumber: PLN

Grafik 1.27 Kredit Sektor LGA



Sumber: BI

1.4 TENAGA KERJA & KESEJAHTERAAN

Perbaikan percepatan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat selama beberapa tahun terakhir telah diikuti perbaikan pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Angka statistik BPS Provinsi NTB menunjukkan terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat dari 7,55% pada posisi Februari 2007 menjadi 5,20% pada posisi Februari 2008.

Penyerapan tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat masih terkonsentrasi pada sektor primer. Sektor pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja mencapai 49,58% diikuti sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa dengan tingkat penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar 14,88% dan 12,51%. Masih tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dikonfirmasi oleh struktur ekonomi Nusa Tenggara Barat yang masih berbasis pertanian.

Mencermati perkembangan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTB, pada periode Januari-Juni 2008, tercatat sebanyak 23.800 TKI telah berhasil ditempatkan di luar negeri. Seperti periode-periode sebelumnya, negara tujuan utama TKI masih terfokus pada Malaysia dan Arab Saudi dengan pangsa masing-masing sebesar 57,10% dan 42,40%.

Masih relatif rendahnya keterampilan dan pendidikan para TKI tersebut, yang sebagian besar berlatar pendidikan sekolah dasar (58,08%), menyebabkan sebagian besar dipekerjakan pada sektor informal. Dari penempatan sebanyak 23.800 TKI sepanjang semester II-2008, sebanyak 54,62% bekerja di sektor perkebunan sebagai petani penggarap, berikutnya sebanyak 42,56% bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Mencermati daerah asal TKI, pada triwulan II-2008 terjadi pergeseran pangsa asal TKI ke wilayah Pulau Sumbawa. Dominasi Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur sebagai daerah penyalur TKI dengan pangsa 66,14% pada Juni 2007 turun menjadi 53,32% per Juni 2008. Sementara daerah Sumbawa secara agregat yang hanya memiliki andil sebesar 19,38% pada Juni 2007 meningkat menjadi 30,02% pada akhir Juni 2008. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Lombok menyebabkan banyak angkatan kerja di Pulau Sumbawa yang beralih pekerjaan menjadi TKI di luar negeri.

Berdasarkan data perbankan pada periode Januari-Juni 2008, jumlah remitansi TKI yang masuk ke Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak Rp237 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah remitansi pada periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp220 miliar. Diperkirakan masih terdapat jumlah remitansi yang masuk ke Nusa Tenggara Barat namun tidak tercatat karena melalui jalur non perbankan seperti via jasa remitansi lembaga keuangan non bank maupun dengan dibawa secara tunai.

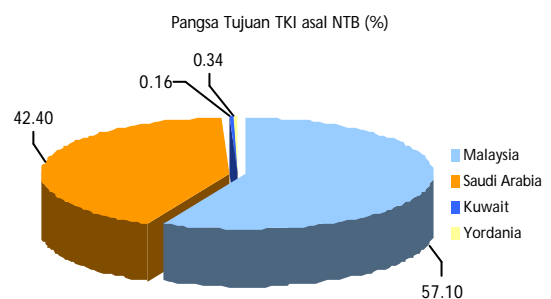
Tabel 1.10

Tabel Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Keterangan	Feb-07	Feb-08
Penduduk Usia ≥ 15 tahun	3,004,121	2,971,564
Angkatan Kerja	2,114,409	2,073,397
Bekerja	1,954,696	1,965,602
Pengangguran	159,713	107,795
Bukan Angkatan Kerja	889,712	898,167
TPAK (%)	70.38%	69.77%
TPT (%)	7.55%	5.20%

Sumber: BPS

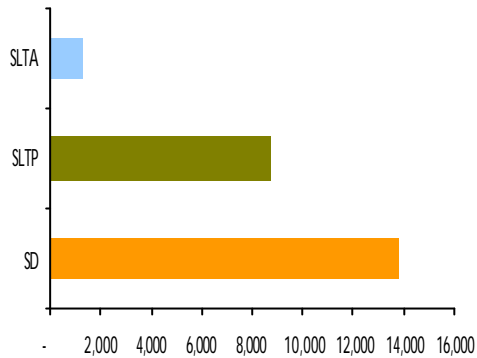
Grafik 1.29



Sumber: Disnaker NTB

Grafik 1.30

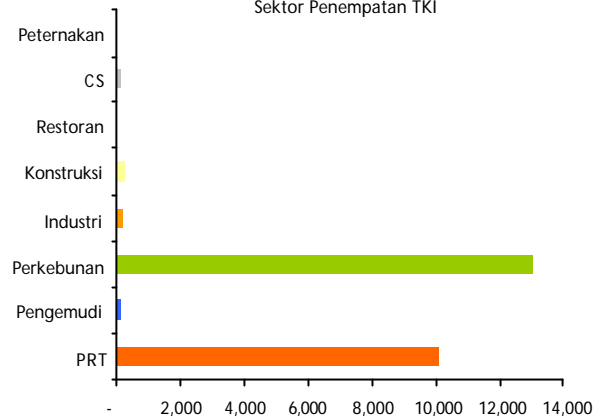
Latar Belakang Pendidikan TKI dari NTB



Sumber: Disnaker NTB

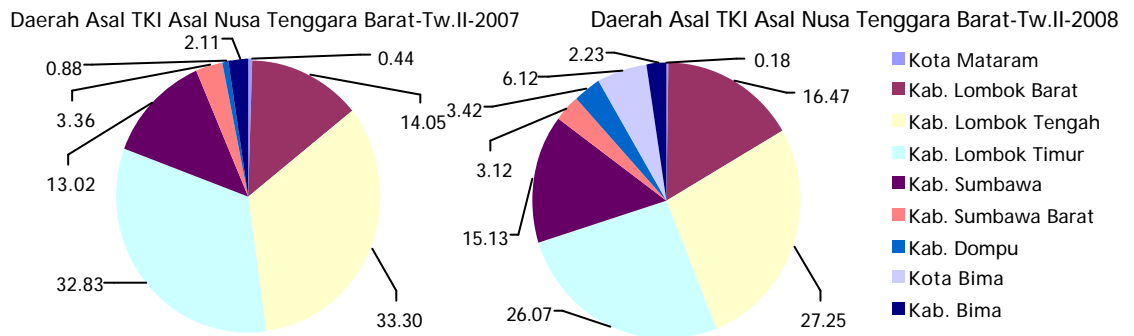
Grafik 1.31

Sektor Penempatan TKI



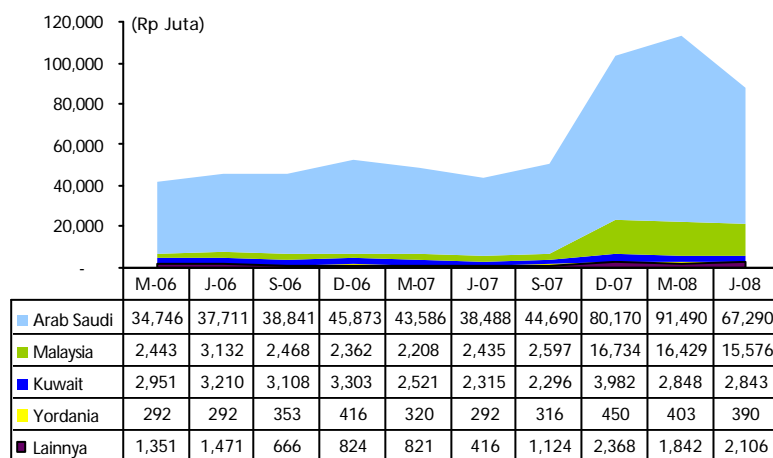
Sumber: Disnaker NTB

Grafik 1.32 Perbandingan Daerah Asal TKI di NTB



Sumber: Disnaker NTB

Grafik 1.33 Perkembangan Remitansi



Sumber: BI

Lebih lanjut, perbaikan tingkat penyerapan tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat telah berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Menurut angka statistik BPS Provinsi NTB, pada Maret 2008 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 1.080.613 jiwa, lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2007 yang tercatat sebanyak 1.118.452 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat selama ini juga telah berhasil memperbaiki tingkat kesenjangan penduduk miskin. Pada periode Maret 2007-Maret 2008, indeks kedalaman kemiskinan secara agregat mengalami penurunan dari 5,13 pada Maret 2007 menjadi 4,49 pada Maret 2008. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan secara agregat juga mengalami penurunan dari 1,54 pada Maret 2007 menjadi 1,28 pada Maret 2008. Penurunan kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Tabel 1.11 Tabel Penduduk Miskin			Tabel 1.12 Tabel Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan			
Tahun	Penduduk Miskin	Pangsa	Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
2002	1,145,081	27.74%	Indeks P1			
2003	1,054,740	26.34%	Maret 2007	6.85	3.89	5.13
2004	1,031,605	25.26%	Maret 2008	5.99	3.41	4.49
2005	1,033,348	24.94%	Indeks P2			
2006	1,126,674	26.46%	Maret 2007	2.24	1.04	1.54
2007	1,118,452	24.99%	Maret 2008	1.76	0.93	1.28
2008	1,080,613	23,81%				

Sumber: BPS

1.5 KEUANGAN DAERAH

Penerimaan kas pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2008 diperkirakan masih mengikuti pola-pola tahun sebelumnya dan berada pada kisaran 53-65%. Sumber penerimaan utama kas pemerintah utamanya berasal dari dana perimbangan umum yang mencapai kisaran 75% dari total anggaran penerimaan daerah. Di sisi lain, pemerintah di kota/kabupaten tetap berupaya meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Untuk Kota Mataram, dari total anggaran penerimaan pajak daerah sebesar Rp262 miliar hingga saat ini telah terealisasi sebanyak Rp140 miliar yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bumi bangunan. Sementara sumber utama PAD di daerah lainnya seperti di Pulau Sumbawa berasal dari penerimaan pajak rumah makan dan perhotelan, retribusi hasil galian C dan retribusi lainnya.

Realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 dari sisi belanja diperkirakan tidak jauh berbeda dibandingkan pola pada tahun-tahun sebelumnya berada pada kisaran 15-20%. Masih minimnya realisasi anggaran belanja terutama

untuk belanja modal diindikasikan oleh masih lambannya kemajuan proyek pembangunan infrastruktur publik di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2008, pemerintah daerah memusatkan kegiatan pembangunan pada pengembangan jalan skala provinsi di lingkaran selatan Pulau Sumbawa dengan menggunakan anggaran tambahan bantuan dari negara donor Jepang melalui institusi JICA (Japan Indonesian Cooperation Agency). Kemajuan proyek pembangunan tersebut hingga Juni 2008 baru mencapai 10%.

Dari sisi komposisi pangsa APBD Nusa Tenggara Barat berdasarkan wilayah, jumlah anggaran di Pulau Lombok cenderung makin lebih besar dibandingkan alokasi anggaran untuk wilayah Pulau Sumbawa. Pangsa anggaran belanja di wilayah Pulau Sumbawa untuk tahun 2008 tercatat sebesar 25,14% menurun dibandingkan tahun 2007 yang tercatat sebesar 38,43%. Sementara pangsa anggaran belanja di wilayah Pulau Lombok menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 44,74% pada tahun 2007 menjadi 60,29%. Tidak berimbangnya alokasi anggaran ini diperkirakan menjadi kendala bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa untuk mengimbangi percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok.

Tabel 1.13

Tabel APBD

Provinsi NTB (Gabungan Kota/Kabupaten) (Juta Rupiah)

Uraian	APBD 2008	
	Rencana*)	Realisasi Tw II-08**)
Pendapatan daerah	5,361,703	2,409,686
1 Pendapatan Asli Daerah	563,891	219,579
1 Pajak Daerah	334,509	130,258
2 Retribusi Daerah	105,856	41,220
3 Hasil perusahaan milik daerah	39,574	15,410
4 Lain-lain	83,952	32,691
2 Dana Perimbangan	4,659,089	2,127,806
1 Bagi hasil pajak dan bukan pajak	357,793	163,404
2 Dana alokasi umum	3,738,376	1,707,316
3 Dana alokasi khusus	562,919	257,085
3 Lain-lain pendapatan	138,723	62,300
Belanja daerah	7,511,442	2,003,370
1 Belanja tidak langsung	5,170,475	1,860,337
1 Belanja pegawai	4,552,670	1,638,051
2 Belanja bantuan sosial	235,870	84,866
3 Belanja bantuan keuangan	100,000	35,980
4 Belanja bagi hasil	16,234	5,841
5 Belanja tak terduga	37,320	13,428
6 Belanja subsidi dan hibah	97,248	34,990
2 Belanja langsung	2,340,967	143,033
1 Belanja pegawai	368,325	22,505
2 Belanja barang dan jasa	844,900	51,623
3 Belanja modal	1,127,742	68,905

Keterangan

**) Perkiraan BI Mataram

Sumber: Biro Keuangan, diolah

Tabel 1.14

Tabel Perkembangan APBD Nusa Tenggara Barat
(dalam juta rupiah)

	2007			2008				
	Total NTB	Prov. NTB	Total P. Lombok	Total P. Sumbawa	Total NTB	Prov. NTB	Total P. Lombok	Total P. Sumbawa
Pendapatan Asli Daerah	512,094	311,616	124,378	76,100	563,891	349,748	154,539	59,604
Pajak Daerah	296,268	237,745	48,434	10,089	334,509	262,905	60,934	10,670
Retribusi Daerah	95,629	32,321	38,739	24,569	105,856	38,863	45,702	21,291
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	38,053	19,574	11,836	6,643	39,574	19,349	11,341	8,883
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	82,145	21,977	25,369	34,799	83,952	28,631	36,561	18,760
Dana Perimbangan	4,296,349	524,605	2,026,654	1,745,090	4,659,089	685,018	2,256,586	1,717,485
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	393,596	76,947	143,509	173,140	357,793	90,917	140,468	126,408
Dana Alokasi Umum	3,478,868	447,658	1,677,041	1,354,169	3,738,376	511,286	1,874,120	1,352,969
Dana Alokasi Khusus	423,886	-	206,105	217,781	562,919	37,215	241,997	238,108
Lain-Lain	163,822	-	58,611	105,211	138,723	45,600	78,260	60,463
Jumlah Pendapatan	4,972,265	836,221	2,209,643	1,926,401	5,361,703	1,080,366	2,489,384	1,837,553
Pangsa (%)	100.00	16.82	44.44	38.74	100.00	20.15	46.43	34.27
Belanja Tidak Langsung	2,606,759	379,609	1,272,273	954,876	5,170,475	599,116	3,543,076	1,028,283
Belanja Pegawai	2,167,672	235,139	1,102,559	829,974	4,552,670	298,817	3,349,118	904,735
Belanja Subsidi	7,639	6,364	-	1,275	9,595	9,595	-	-
Belanja Hibah	56	-	56	-	87,653	67,000	20,653	-
Belanja Bantuan Sosial	163,141	37,959	73,071	52,112	235,870	99,904	83,769	52,197
Belanja Bagi Hasil	71,315	66,658	3,767	890	116,234	100,000	3,593	12,641
Belanja Bantuan Keuangan	167,736	24,650	82,905	93,172	131,133	16,300	73,101	41,732
Belanja Tidak Terduga	29,200	8,840	9,916	10,445	37,320	7,500	12,843	16,978
Belanja Langsung	2,554,663	488,612	1,037,158	1,028,893	2,340,967	494,651	985,890	860,426
Belanja Pegawai	453,036	136,146	164,614	152,277	368,325	71,261	162,796	134,268
Belanja Barang dan Jasa	821,676	188,733	310,772	322,171	844,900	245,038	320,237	279,626
Belanja Modal	1,279,951	163,733	561,772	554,446	1,127,742	178,352	502,857	446,532
Jumlah Belanja	5,161,422	868,221	2,309,431	1,983,769	7,511,442	1,093,766	4,528,966	1,888,710
Pangsa (%)	100.00	16.82	44.74	38.43	100.00	14.56	60.29	25.14

Sumber: Biro Keuangan, diolah

Boks 1

Hasil Survei Nasional Pola Remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat

Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia terus memberikan sumbangan yang signifikan dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Menurut data tahun 2007, penerimaan devisa dari remitansi TKI secara nasional diperkirakan mencapai USD5,9 miliar atau ekuivalen dengan 27,6% dari total *income & current transfer* yang tercantum dalam NPI. Pada tahun 2008, untuk memprediksi jumlah remitansi secara lebih akurat, Bank Indonesia melaksanakan survei secara nasional untuk menentukan pola pengiriman remitansi TKI. Lebih lanjut, dari survei tersebut dapat diperoleh gambaran awal tentang dampak sosial ekonomi keberadaan para TKI.

Hasil Survei

Pelaksanaan survei pola remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat meliputi 287 responden yang tersebar di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa. Dari survei tersebut diperoleh data tentang profil TKI, peran perbankan dan pola remitansi TKI, serta dampak sosial ekonomi dari penempatan TKI.

a. Profil TKI

Dari sisi usia, sebagian besar TKI asal NTB (25,4%) berada pada rentang usia 27-30 tahun. Sementara dari jenis kelamin lebih didominasi oleh laki-laki sebanyak 68,6%. Pada umumnya, para TKI berlatar belakang pendidikan SD dan SMP masing-masing dengan porsi sebesar 41,81% dan 33,79%. Berdasarkan negara tujuannya, mayoritas ditempatkan di Malaysia, diikuti Arab Saudi dan Jepang. Motivasi mereka pada umumnya seragam, yakni mencari penghasilan yang lebih baik.

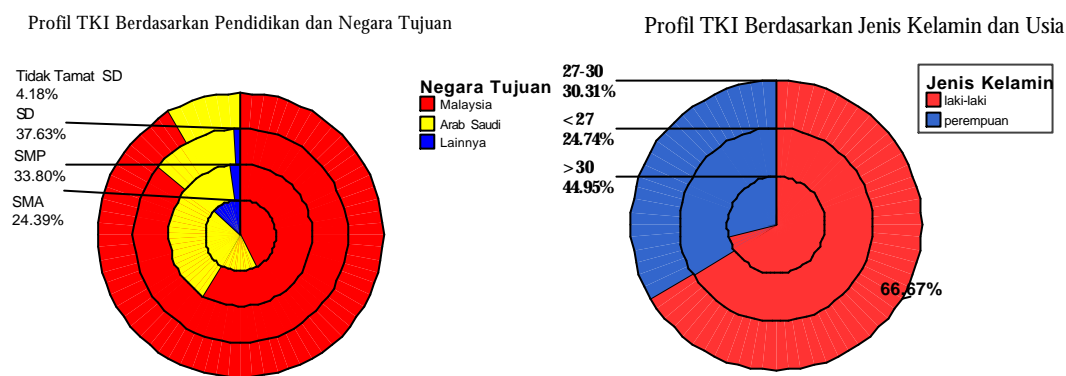
Masih rendahnya pendidikan para TKI menyebabkan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal¹ sebagai buruh perkebunan dan pembantu rumah tangga. Dari total 287 responden, tercatat 54,35% bekerja di perkebunan dengan

¹ Pengklasifikasian sektor informal vs formal menurut BPS sebagai berikut:

- a. Untuk sektor pertanian tanaman bahan pangan, perkebunan dan perikanan dibedakan berdasarkan penguasaan lahan.
- b. Untuk sektor non-pertanian, dibedakan berdasarkan legalitas (Badan Hukum/non-Badan Hukum, surat izin instansi terkait)

rata-rata penghasilan per bulan pada kisaran Rp1,7 juta dan 25,78% bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan rata-rata penghasilan per bulan pada kisaran Rp1,5 juta. Hampir seluruh (99,35%) TKI yang bekerja di perkebunan ditempatkan di Malaysia, sementara TKI yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga sebagian besar (90,45%) ditempatkan di Arab Saudi.

Rata-rata penghasilan pekerja di perkebunan lebih tinggi di Malaysia (Rp1,777 juta) dibandingkan di Arab Saudi (Rp1,416 juta). Sedangkan rata-rata penghasilan pembantu rumah tangga lebih tinggi di Arab Saudi (Rp1,545 juta) dibandingkan di Malaysia (Rp1,462 juta). Pekerjaan dengan rata-rata penghasilan tertinggi diperoleh dari pekerjaan sebagai buruh bangunan di Jepang pada kisaran Rp8,141 juta.



Jenis Pekerjaan TKI Vs Negara Penempatan TKI

Jenis pekerjaan TKI	Negara Tujuan			Total Row %
	Malaysia	Arab Saudi	Lainnya	
	Row %	Row %	Row %	
Buruh Bangunan	82.4%	17.6%	100.0%	
Buruh Pabrik	42.9%	28.6%	28.6%	
Buruh Pertambangan	50.0%		50.0%	
Jasa-Debtcollection			100.0%	
Jasa-Laundry		100.0%	100.0%	
Jasa-Pantipijat	100.0%		100.0%	
Jasa-Supermarket		100.0%	100.0%	
Jasa-Wartel		100.0%	100.0%	
Nelayan	100.0%		100.0%	
Pembantu Rumah Tangga	6.8%	90.5%	2.7%	
Pengasuh Bayi		85.7%	14.3%	
Pengemudi	75.0%	25.0%	100.0%	
Penjaga Sekolah		100.0%	100.0%	
Percetakan			100.0%	
Perkebunan	99.4%	.6%	100.0%	
Pertanian	100.0%		100.0%	
Pertukangan	100.0%		100.0%	
Peternakan	100.0%		100.0%	
Total	66.7%	29.5%	3.9%	

b. Peran Perbankan dan Pola Remitansi TKI

Menurut hasil survei, sebagian besar responden TKI menggunakan jalur perbankan untuk mengirimkan uang mereka ke Indonesia. Dari keseluruhan responden, tercatat 87,1% menggunakan jalur perbankan sementara sisanya menitipkan lewat teman atau membawa tunai. Mayoritas TKI mencapai 43% mulai melakukan pengiriman remitansi TKI setelah 34 bulan bekerja. Dari hasil survei tersebut, diperkirakan jumlah remitansi TKI yang masuk ke Nusa Tenggara Barat untuk periode Januari-Desember 2007 dan Januari-Juni 2008 mencapai Rp532 miliar dan Rp273 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dari jumlah yang tercatat melalui bank sebesar Rp463 miliar dan Rp237 miliar.

Menurut latar belakang pendidikan, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki TKI semakin tinggi pula pangsa penggunaan bank sebagai jalur pengiriman remitansi. Dari responden yang berpendidikan SD tercatat sebanyak 79,62% menggunakan jasa bank untuk pengiriman remitansi TKI, angka penggunaan yang lebih tinggi ditunjukkan oleh TKI yang berpendidikan SMP dan SMA masing-masing sebesar 92,78%, dan 91,4%.

Berdasarkan negara penempatan TKI, TKI di Arab Saudi cenderung lebih banyak menggunakan jasa bank untuk pengiriman remitansi TKI dibandingkan TKI yang ditempatkan di Malaysia. Hasil survei menunjukkan 91,6% dari TKI yang ditempatkan di Arab Saudi menggunakan jasa bank untuk remitansi TKI, sementara dari TKI yang ditempatkan di Malaysia tercatat 84,82% menggunakan jasa bank untuk remitansi TKI.

Moda Pengiriman Remitansi TKI Vs Pendidikan

		Moda Pengiriman Remitansi TKI		Total
		Bank	Non bank	
		Row %	Row %	Row %
Pendidikan TKI	Tidak Tamat SD	83.3%	16.7%	100.0%
	SD	79.6%	20.4%	100.0%
	SMP	92.8%	7.2%	100.0%
	SMA	91.4%	8.6%	100.0%
Total		87.1%	12.9%	100.0%

Moda Pengiriman Remitansi TKI Vs Negara

		Moda Pengiriman Remitansi TKI		Total
		Bank	Non bank	
		Row %	Row %	Row %
Negara Tujuan	Malaysia	84.8%	15.2%	100.0%
	Arab Saudi	91.7%	8.3%	100.0%
	Lainnya	91.7%	8.3%	100.0%
Total		87.1%	12.9%	100.0%

c. Dampak Sosial Ekonomi TKI

Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian besar dari responden TKI bekerja di luar negeri dalam jangka waktu di atas 2 tahun. Dari 287 responden, 123 responden (42,85%) menjawab kurun waktu bekerja sebagai TKI di luar negeri berada pada kurun waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara yang menjawab rata-rata 1 hingga 2 tahun dan kurang dari 1 tahun masing-masing sebesar 71 responden (24,73%) dan 11 responden (3,8%).

Lebih lanjut, sebagian besar remitansi TKI yang dikirim ke Indonesia ternyata digunakan untuk membayar hutang yang mereka pergunakan untuk membiayai keberangkatan mereka sebagai TKI. Namun demikian, pada umumnya mayoritas para TKI (84%) merasa menjadi TKI bisa membuat kondisi ekonomi keluarga mereka menjadi lebih baik dengan bisa menyisihkan dana untuk modal usaha, membeli lahan, membangun rumah, dan lainnya.

Ironisnya walaupun latar belakang pendidikan mereka pada umumnya rendah, sebagian besar responden (59,58%) menyatakan tidak memerlukan pelatihan sekembalinya mereka dari luar negeri sebagai TKI tanpa memberikan alasan yang kuat. Di sisi lain, dari responden yang menyatakan memerlukan pelatihan, sebagian besar (71%) menyatakan pelatihan yang mereka perlukan adalah di bidang kewirausahaan.

Alasan Perlunya Pelatihan TKI Purna Vs Latar Belakang Pendidikan TKI

Count

		Pendidikan resp				Total
		Tidak Tamat	SD	SMP	SMA	
Alasan memerlukan pelatihan	Bahasa	.00	.00	.00	4.17	.86
	Bengkel	14.29	1.76	.00	.00	6.63
	Elektro	.00	1.96	.00	.00	.86
	Kewirausahaan	42.86	62.75	79.41	83.33	70.69
	Pertanian	14.29	5.88	8.82	4.17	6.90
	Pertukangan	14.29	5.88	8.82	4.17	6.90
	Peternakan	14.29	7.84	.00	.00	4.31
	PKK	.00	1.96	2.94	.00	1.72
	tataboga	.00	1.96	.00	.00	1.00
	Tatagraha	.00	.00	.00	4.17	1.00
Total		100	100	100	100	100

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Masih minimnya pendidikan para TKI menyebabkan mereka hanya mampu bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan keterampilan para TKI oleh BNP2TKI dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga mereka mampu bekerja di sektor formal dengan penghasilan yang lebih baik. Namun bagi sektor informal terutama sebagai pembantu rumah tangga tersebut setidaknya perlu dilakukan pelatihan/simulasi penggunaan alat-alat rumah tangga modern di luar negeri agar tidak terjadi miskompetensi.
2. Hasil survei menunjukkan masih terdapat TKI yang belum menggunakan jasa perbankan untuk remitansi TKI, salah satunya diperkirakan karena relatif rendahnya pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu, pihak perbankan perlu melakukan upaya sosialisasi penggunaan jasa remitansi kepada para TKI sekaligus memberikan fasilitas pembiayaan dengan bunga khusus dan metode pelunasan yang disesuaikan dengan lapangan kerja para TKI. Selain itu perlu juga pemberian informasi berupa buku saku tata cara transaksi dan lokasi bank koresponden di luar negeri di dekat wilayah TKI biasanya berada. Bila diperlukan, dapat dilakukan simulasi transaksi pengiriman remitansi pada saat persiapan akhir pemberangkatan (PAP) para TKI.
3. Pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Departemen Kehakiman, dan Perbankan perlu bersinergi agar proses penempatan TKI dari hulu hingga hilir dapat difasilitasi dengan baik. Selain fasilitasi pelatihan pra penempatan TKI dan pemberian fasilitas pembiayaan, segenap pihak terkait perlu menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi para TKI Purna sehingga mereka dapat memanfaatkan modal dan pengalaman yang mereka peroleh di luar negeri untuk menggerakkan sektor riil di Indonesia.
4. Mempertimbangkan sebagian besar TKI baru dapat mengirimkan remitansi setelah 3-4 bulan bekerja, pihak perbankan perlu memberikan *grace periode* kepada para TKI yang dibiayai perbankan sesuai sektor pekerjaannya. Dengan demikian, TKI tersebut tidak terbebani kredit dari perbankan dan tetap dapat mengirimkan remitansi kepada keluarganya di Indonesia.

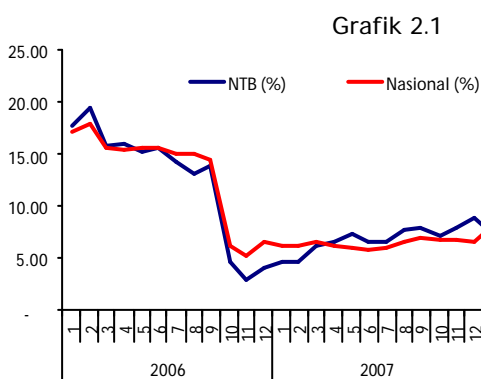
BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI NUSA TENGGARA BARAT

2.1 KONDISI UMUM

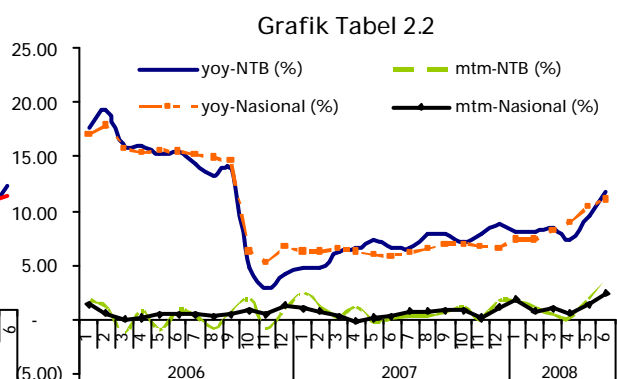
Laju inflasi Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2008 melewati proyeksi awal sebesar 7-8,5% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2007. Kenaikan harga barang dan jasa di Nusa Tenggara Barat pada Juni 2008 telah menyentuh level 12,46% (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 11,03% (yoy). Determinan inflasi utamanya bersumber dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada bulan Mei 2008. Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan atas anggaran subsidi BBM akibat gejolak harga minyak dunia.

Sejak bulan Juni 2008, inflasi Nusa Tenggara Barat dihitung berdasarkan inflasi Kota Mataram dan Kota Bima. Laju inflasi Nusa Tenggara Barat pada triwulan ini didominasi inflasi Kota Mataram yang mencapai 11,84% (yoy) dengan andil sebesar 9,35% (yoy) pada agregat inflasi Nusa Tenggara Barat. Sementara, inflasi di Kota Bima pada bulan triwulan ini tercatat sebesar 14,78%(yoy) lebih tinggi dibandingkan Kota Mataram dan memberi andil sebesar 3,10%(yoy) pada keseluruhan inflasi Nusa Tenggara Barat.

Inflasi sepanjang triwulan II-2008 terjadi pada seluruh kelompok barang, *administered price goods*, *volatile foods* dan *core inflation goods*. Tekanan inflasi pada kelompok *administered price goods* yakni komoditas bensin bersumber dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sementara untuk *kelompok volatile foods* seperti beras lebih dipengaruhi ekspektasi inflasi para pelaku dunia usaha. Di sisi lain, inflasi inti mengalami kenaikan sebagai *second round effect* kenaikan harga BBM.



Sumber: BPS



Sumber: BPS

2.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN INFLASI

Komponen inflasi inti tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar pada triwulan II-2008. Pada triwulan ini, seluruh komponen inflasi, *core inflation goods*, *volatile foods* dan *administered price goods* mengalami peningkatan laju dan sumbangan inflasi.

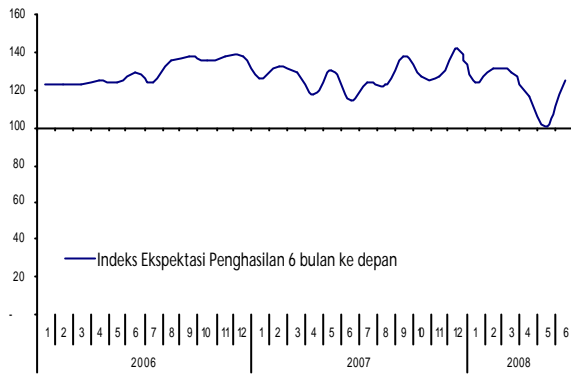
Tekanan inflasi pada kelompok *administered price goods* dipicu kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008. Kenaikan harga minyak dunia yang menyentuh kisaran USD145-150 per barel hingga pertengahan triwulan ini membuat beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah terus membengkak sehingga kebijakan menaikkan harga BBM menjadi tidak terelakan. Komoditas bensin menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kota Mataram pada bulan Juni 2008 mencapai 0,98% (mtm). Sementara di Kota Bima, komoditas bensin juga menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Kota Bima mencapai 0,67% (mtm).

Inflasi *volatile foods* terus mengalami kenaikan sepanjang triwulan II-2008 yang turut dipengaruhi gejolak harga energi dan pangan dunia. Beras sebagai salah satu komponen utama inflasi pada kelompok *volatile foods* mulai menunjukkan kenaikan sejak awal bulan Mei 2008. Kenaikan harga beras tersebut dipicu ekspektasi inflasi pedagang besar dan eceran yang cenderung terus meningkat sejak wacana kenaikan harga BBM didengungkan pemerintah.

Lebih lanjut, inflasi *volatile foods* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Peningkatan pajak ekspor yang tinggi oleh negara produsen beras untuk menjaga kecukupan persediaan beras di dalam negara tersebut telah menyebabkan kelangkaan beras di dunia. Akibatnya, kenaikan harga beras di dunia menjadi tidak terelakan dan mempengaruhi harga beras dalam negeri.

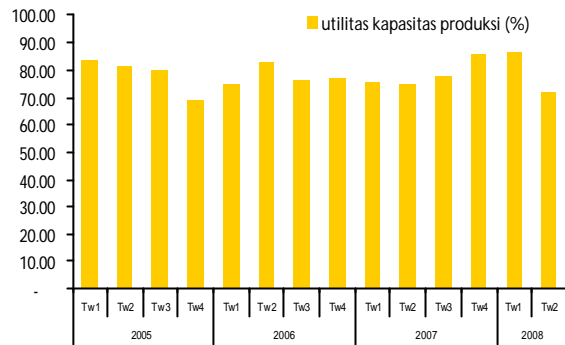
Laju inflasi inti pada triwulan ini lebih dipengaruhi oleh tingginya ekspektasi inflasi konsumen maupun para pedagang besar dan eceran. Berdasarkan hasil survei BI Mataram, rata-rata utilisasi kapasitas produksi pada triwulan II-2008 tercatat sebesar 71,55% menurun dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya utilisasi kapasitas produksi tersebut mengindikasikan kesenjangan output masih negatif sehingga belum terdapat tekanan inflasi dari interaksi sisi penawaran dan sisi permintaan.

Grafik 2.3



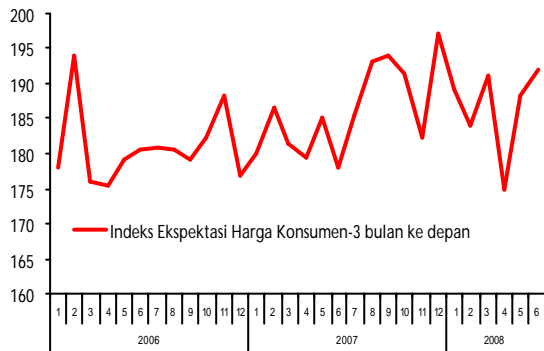
Sumber: BI

Grafik 2.4



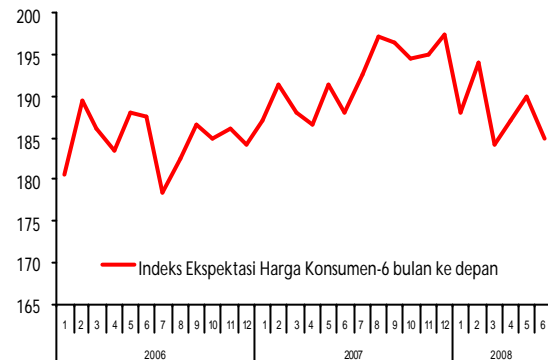
Sumber: BI

Grafik 2.5



Sumber: BI

Grafik 2.6



Sumber: BI

2.3 ANALISA KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI

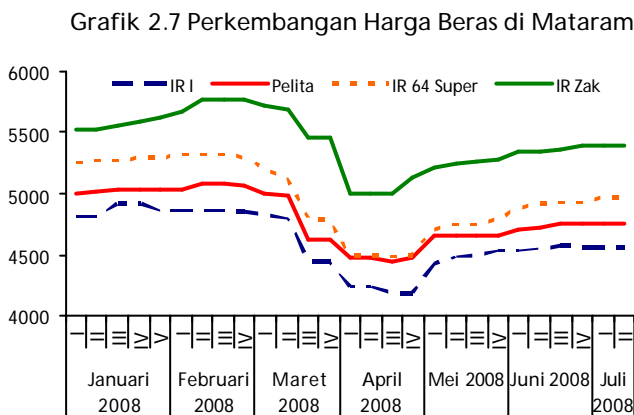
Komoditas kelompok bahan makanan masih mendominasi inflasi Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2008, diikuti oleh komoditas kelompok transportasi, komunikasi dan keuangan. Laju inflasi di Kota Mataram pada bulan Juni 2008 didominasi kenaikan harga beras, bensin, semen, batu bara dan nasi. Sementara inflasi di Kota Bima pada bulan Juni 2008 didominasi oleh kenaikan harga bensin, mie, pasir, kue kering dan pisang.

2.3.1 KOTA MATARAM

Inflasi bulan Juni 2008 di Kota Mataram utamanya bersumber dari kenaikan harga bensin yang mencapai 22,77% (mtm) dengan andil sebesar 0,98% (mtm). Sementara harga beras yang mulai menunjukkan tren kenaikan sejak awal Mei 2008 tercatat mengalami inflasi sebesar 4,1% (mtm) dengan andil 0,15% (mtm). Kenaikan

harga beras sepanjang triwulan II-2008 lebih disebabkan oleh tingginya ekspektasi inflasi para pedagang besar dan eceran. Namun demikian, operasi stabilisasi harga beras (OSHB) yang dilakukan Bulog dan Disperindag cukup efektif menekan lonjakan harga beras. Ketersediaan stok beras untuk operasi pasar didukung keberhasilan panen raya pertama padi pada bulan April 2008.

Di lain sisi, maraknya kegiatan konstruksi bangunan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap bahan bangunan seperti batu bata, semen dan pasir. Tekanan dari sisi permintaan ditambah tekanan dari sisi produksi akibat bertambahnya biaya transportasi barang menyebabkan komoditas tersebut mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Komoditas batu bata tercatat mengalami kenaikan sebesar 40,25% (mtm) dengan andil terbesar kedua terhadap inflasi Kota Mataram sebesar 0,41% (mtm). Selanjutnya, kenaikan juga terjadi pada komoditas semen dan pasir yang mengalami lonjakan harga masing-masing sebesar 10,90% (mtm) dan 16,57% (mtm).



Sumber: BPS

Tabel 2.1
Komoditas Penyumbang Inflasi Tertinggi Bulan Juni 2008 di Kota Mataram

No	Jenis Barang	Inflasi	Andil
1	Bensin	22.77%	0.98%
2	Batu Bata	40.25%	0.41%
3	Beras	2.79%	0.16%
4	Nasi	4.10%	0.15%
5	Semen	10.90%	0.14%

Sumber: BPS

2.3.2 KOTA BIMA

Tabel 2.2
Komoditas Penyumbang Inflasi Tertinggi Bulan Juni 2008 di Kota Bima

No	Jenis Barang	Inflasi	Andil
1	Mie	20.00%	0.67%
2	Bensin	22.77%	0.62%
3	Pasir	33.93%	0.24%
4	Kue Kering	22.20%	0.23%
5	Pisang	36.67%	0.21%

Sumber: BPS

Laju inflasi di Kota Bima, yang untuk pertama kalinya dihitung oleh BPS Prov NTB pada bulan Juni 2008, selain dipicu oleh kenaikan harga bensin juga turut diwarnai kenaikan harga barang dari kelompok makanan jadi. Pelaksanaan kampanye pilkada Bupati Bima yang berlangsung pada triwulan II-2008 telah menyebabkan peningkatan permintaan atas komoditas mie instant maupun kue kering, yang umumnya dibagikan para peserta pilkada sebagai bagian dari kampanye mereka.

Harga mie instan mengalami kenaikan harga sebesar 20% (mtm) dengan andil tertinggi terhadap inflasi Kota Bima sebesar 0,67%. Di tempat kedua, komoditas bensin memberi andil inflasi terbesar kedua mencapai 0,62% (mtm) dengan laju inflasi sebesar 22,77% (mtm). Sementara kue kering yang juga mengalami kenaikan pada kisaran 22,20% (mtm) menyumbang inflasi sebesar 0,23% (mtm).

Boks 2

Perubahan Cakupan Penghitungan Inflasi di Nusa Tenggara Barat

Semenjak bulan Juni 2008, penghitungan inflasi secara nasional mengalami perubahan tahun dasar untuk meningkatkan akurasi perhitungan inflasi. Tahun dasar dan penimbang penghitungan IHK/Inflasi harus diperbaharui setiap 5-10 tahun sekali. Dengan demikian, tahun dasar terakhir yakni tahun 2002 dimutakhirkan menjadi tahun dasar baru yakni tahun 2007 melalui Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007.

Perkembangan pola konsumsi masyarakat yang dinamis turut menyebabkan perubahan pada cakupan paket komoditas dan bobot dari masing-masing komoditas tersebut seperti yang tercermin dari hasil SBH Tahun 2007. Lebih lanjut, peningkatan jumlah provinsi yang dibarengi dengan peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah menuntut perluasan penghitungan inflasi dari sisi cakupan kota dengan bobot yang disesuaikan pula. Perubahan cakupan penghitungan inflasi secara nasional dan secara regional untuk Nusa Tenggara Barat terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Perbandingan Penghitungan Inflasi Berdasarkan SBH 2002 Vs SBH 2007

SBH	CAKUPAN KOTA	PAKET KOMODITAS	% MAKANAN & NON MAKANAN	PASAR	RELEASE DATA
SBH 2002	Nasional 45 Kota : 30 Ibukota Provinsi 15 Kota/Kabupaten Prov. NTB Kota Mataram	Total : 744 Per Kota : 283 – 397 Kota Mataram : 305	Nasional : -Makanan : 43,38 -Non Makanan : 56,62 Kota Mataram : -Makanan : 50,66 -Non Makanan : 49,34	Kota Mataram 4 Pasar	Januari 2004
SBH 2007	Nasional 66 Kota : -33 Ibukota Provinsi 33 Kota/Kabupaten Prov. NTB Kota Mataram dan Kota Bima	Total : 775 Per Kota : 284 – 444 Kota Mataram : 334 Kota Bima : 289	Nasional : -Makanan : 36,12 -Non Makanan : 63,88 Kota Mataram : -Makanan : 43,71 -Non Makanan : 56,29 Kota Bima : -Makanan : 46,30 -Non Makanan : 53,70	Kota Mataram 4 Pasar Kota Bima 2 Pasar	Juli 2008

Untuk Nusa Tenggara Barat, penghitungan inflasi sejak Juni 2008 merupakan hasil pembobotan inflasi di Kota Mataram dan inflasi di Kota Bima. Bobot masing-

masing kota yakni sebesar 0,79% untuk Kota Mataram dan 0,21% untuk Kota Bima. Berdasarkan SBH Tahun 2007, telah terjadi perubahan pola konsumsi di masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram yang mengalami peningkatan pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sedangkan konsumsi untuk kelompok bahan makanan cenderung menurun. Perubahan pola konsumsi tersebut menyebabkan perubahan pada pembobotan kelompok komoditas dalam penghitungan inflasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel Bobot Per Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga di Provinsi NTB

KOMODITI	SBH2002 Mataram	SBH2007 Mataram	SBH2007 Bima	SBH2007 NTB
UMUM/TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
1. Bahan Makanan	31,30	23,83	27,71	24,64
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	19,36	19,87	18,59	19,60
3. Perumahan,Air,Listrik,Gas & Bahan Bakar	23,64	23,73	20,21	22,99
4. Sandang	5,22	5,57	7,09	5,89
5. Kesehatan	4,37	3,80	3,72	3,78
6. Pendidikan, Rekreasi Dan Olah Raga	4,25	5,20	5,33	5,23
7. Transpor,Komunikasi Dan Jasa Keuangan	11,85	18,00	17,35	17,86
BOBOT TERHADAP INFLASI NASIONAL	1,06%	0,79%	0,21%	1,00%

BAB 3

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

Perkembangan indikator industri perbankan di Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2008 menunjukkan tren positif dan berkualitas meskipun dibayangi oleh laju inflasi yang cukup tinggi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

3.1. Intermediasi Perbankan

Kondisi makro ekonomi yang kurang menggembirakan sepanjang triwulan II-2008 dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak pada 24 Mei 2008 memicu angka inflasi mengalami kenaikan pada Juni 2008 mencapai 11,03 (yoy). Adanya peningkatan harga beberapa komoditas dalam triwulan II-2008 tidak langsung menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang cenderung terjadi masyarakat terpaksa menggunakan sebagian simpanannya dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan hasil survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia selama April sampai dengan Juni 2008 dan terlihat dari pertumbuhan DPK yang menurun jika dibandingkan periode yang sama satu tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit tumbuh cukup signifikan mencapai hingga 49,15% (yoy). Dengan pertumbuhan DPK hanya mencapai 13,90% (yoy) mendorong LDR perbankan NTB meningkat hingga 100,82% (berdasarkan laporan bulanan). Hal yang menggembirakan adalah peningkatan pertumbuhan kredit ini diikuti dengan membaiknya kualitas kredit yang diberikan, yang tercermin dari menurunnya *Non Performing Loans* (NPLs) gross dari 3,82% menjadi 3.41%.

Dengan indikator perbankan yang cukup baik tersebut perbankan belum menurunkan spread margin yang diperoleh, terlihat dari rasio *Net Interest Margin* (NIM) yang tetap cukup tinggi (diatas 10%). Hal ini terjadi karena meskipun suku bunga kredit turun namun *cost of fund* dana pihak ketiga juga masih rendah karena pangsa deposito hanya sebagian kecil saja dari pangsa DPK. Jadi, meskipun suku bunga SBI kembali naik dan adanya kenaikan biaya overhead perbankan (khususnya bank umum) masih memiliki ruang untuk tidak menaikkan suku bunga kreditnya dengan cara mengurangi sedikit margi keuntungannya.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Perbankan di NTB

Indikator	2006				2007				2008	
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2
1 Aset	5,683	6,011	6,321	6,728	6,939	7,291	7,539	7,575	7,919	8,398
% (yoy)	25.19	18.39	20.01	22.40	22.10	21.30	19.26	12.58	14.12	15.19
2 Kredit	3,582	3,788	3,935	4,029	4,214	4,664	4,984	5,050	5,221	5,816
% (yoy)	26.07	22.23	20.77	20.16	17.64	23.11	26.67	25.35	23.90	49.15
3 DPK	4,204	4,554	4,552	5,081	5,243	5,241	5,416	5,627	5,597	5,768
% (yoy)	28.40	29.68	19.23	24.91	24.70	15.09	18.97	10.76	6.75	13.90
4 LDR (%)	85.20	83.19	86.44	79.29	80.38	88.98	92.03	89.74	93.29	100.82
5 NPL (%)	2.81	2.99	3.05	2.76	2.92	4.15	4.08	3.33	3.82	3.41
6 NIM (%)*)	12.17	11.78	11.21	13.16	11.38	11.32	10.98	10.89	11.46	11.43
*) Bank Umum										

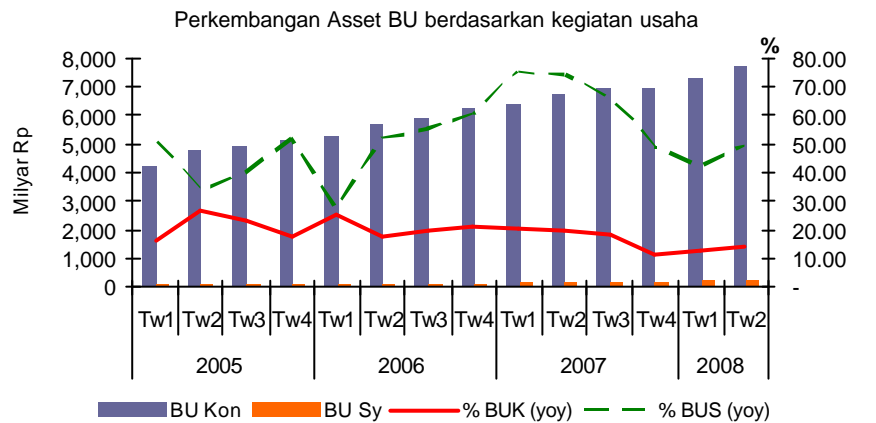
Sumber : KBI Mataram

3.2. Perkembangan Aset Bank Umum

Sejalan dengan perlambatan DPK yang dihimpun, total aset Bank Umum di NTB secara tahunan pertumbuhannya mengalami perlambatan dari sebesar 20,91% pada triwulan II-2007 menjadi sebesar 14,76% pada triwulan laporan, namun pertumbuhan secara triwulanan pada periode ini sudah lebih baik daripada periode triwulan sebelumnya, begitu pula dengan angka nominal yang mengalami peningkatan dari sebesar Rp6,91 triliun pada triwulan II-2007 menjadi Rp7,93 triliun. Penurunan secara tahunan tersebut lebih disebabkan oleh penurunan deposito milik pemerintah mencapai minus 58,25% (yoy) dan giro milik pemerintah di bank umum pemerintah mencapai minus 19,97% (yoy).

Berdasarkan kegiatan usaha, bank umum yang beroperasi secara syariah pertumbuhan asetnya jauh lebih tinggi dibandingkan bank umum yang beroperasi secara konvensional meskipun jumlah banknya jauh di bawah bank umum konvensional.

Grafik 3.1.



Ket : BU Kon (BUK) = Bank Umum Konvensional, BU Sy (BUS) = Bank Umum Syariah

Sumber : KBI Mataram

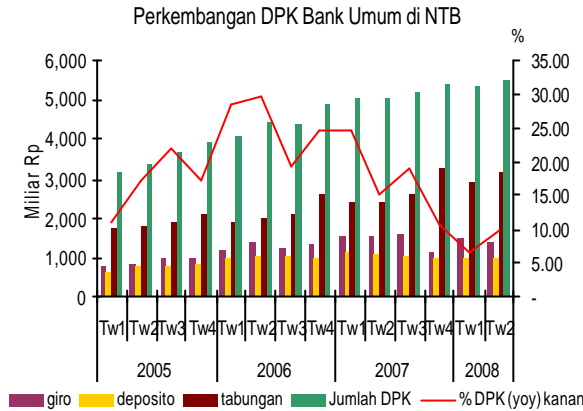
3.3. Penghimpunan Dana Masyarakat

Dana Pihak Ketiga bank umum pada triwulan II-2008 pertumbuhannya mengalami perlambatan dengan struktur masih didominasi oleh sumber dana jangka pendek.

Pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 9,39% (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 14,58% (yoy). Dilihat dari sumber DPK bank umum, porsi terbesar masih berasal dari dana yang relatif murah, yaitu tabungan yang hingga akhir triwulan laporan pangsa mencapai 57,93% dengan nominal Rp3.19 triliun. Sementara itu, menurunnya porsi simpanan giro terutama disebabkan oleh diberlakukannya sistem *Treasury Single Account* oleh pemerintah pusat, yang menyebabkan posisi simpanan giro di bank umum yang menjadi tempat menyimpan Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus (DAU/DAK) mengalami perubahan siklus. Selain itu, penurunan dana dalam bentuk deposito

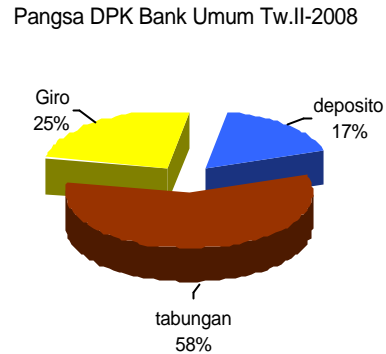
mengindikasikan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dana likuid untuk transaksi tunai oleh dunia usaha terutama pembelian bahan baku/barang dagangan dan kebutuhan biaya pendidikan masyarakat.

Grafik 3.2



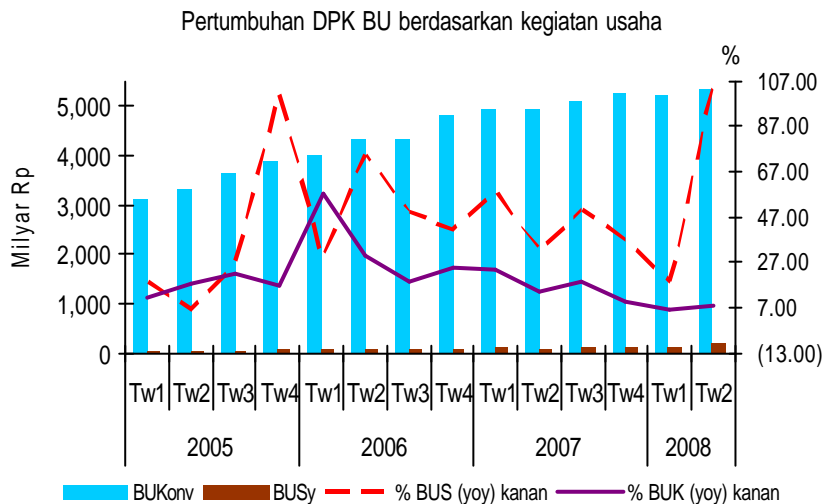
Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.3



Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.4.



Sumber : KBI Mataram

Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan simpanan tabungan cenderung lebih menguntungkan bank, mengingat jenis simpanan tersebut biasanya dihimpun dari masyarakat (risiko tersebar) dan memiliki biaya bunga yang lebih rendah dibanding simpanan deposito. Hingga saat ini, promosi yang dilakukan untuk menarik dana pihak ketiga oleh bank umum masih dalam persaingan yang wajar/sehat.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, lembaga keuangan bank masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabahnya. Selain sebagai lembaga yang menjalankan tugas intermediasi, perbankan juga semakin inovatif dalam mengembangkan produknya. Adanya

SMS banking, internet banking, Automatic Teller Machine (ATM), sistem pembayaran secara realtime dan jasa layanan lainnya, menjadikan nasabah perbankan belum berpaling ke lembaga keuangan non bank, di samping belum tersosialisasi dengan baik pasar keuangan/modal sebagai alternatif penempatan dana masyarakat.

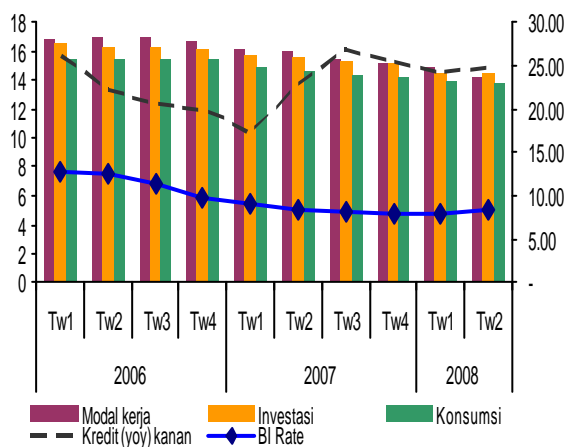
3.4. Penyaluran Kredit

Pertumbuhan kredit bank umum masih didominasi untuk sektor konsumtif dan disertai dengan perbaikan kualitas kredit. Penyaluran kredit bank umum di NTB pada triwulan II-2008 sebesar Rp5,46 triliun dengan pertumbuhan mencapai 24,69% (yoy), meningkat sebesar 1,72% bila dibandingkan triwulan yang sama tahun 2007 yang mencapai 22,98%. Jenis kredit yang menjadi konsentrasi perbankan disaat laju inflasi yang tinggi adalah untuk jenis kredit yang potensial dengan risiko kredit yang rendah. Selain itu, perbankan juga cenderung memberikan kredit untuk jangka pendek.

Segmen pasar kredit konsumsi tetap menjadi primadona penyaluran kredit bank umum di NTB dengan pangsa mencapai 58,08%, sedangkan segmen untuk modal kerja dan investasi masing-masing mencapai 35,27% dan 6,65%. Pangsa kredit modal kerja sejak 2006 yang relatif stagnan dan kecilnya kredit investasi ini perlu mendapat perhatian manajemen bank, mengingat kredit investasi memiliki *multiplier effect* yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dibanding jenis kredit konsumtif. Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) relatif lebih memiliki respon yang lebih cepat dalam menggerakkan sektor riil yang pada akhirnya menjadi salah satu solusi yang cepat pula dalam menyerap angkatan kerja.

Grafik 3.5

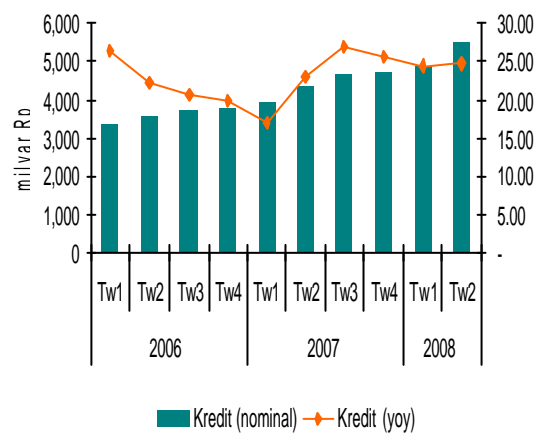
Pertumbuhan Kredit dan Perkembangan Suku Bunga Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan serta suku bunga SBI



Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.6

Pertumbuhan Kredit (yoy)



Sumber : KBI Mataram

Tabel 3.2
Perkembangan Kredit Bank Umum di NTB

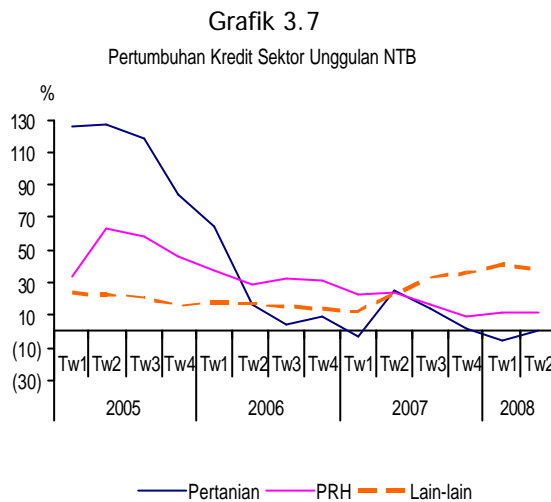
Penyaluran Kredit	2006				2007				2008		Pert.Q2-08
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	voy (%)
1 Menurut Jenis Penggunaan	3,367	3,562	3,698	3,782	3,938	4,380	4,685	4,747	4,898	5,462	24.69
- Modal Kerja	1,250	1,316	1,408	1,470	1,544	1,697	1,774	1,742	1,726	1,927	13.50
- Investasi	352	381	395	401	409	393	382	407	374	363	-7.66
- Konsumsi	1,766	1,864	1,895	1,910	1,984	2,290	2,529	2,598	2,799	3,172	38.55
2 Menurut Sektor Ekonomi											
- Pertanian	173	150	149	155	168	188	170	158	159	189	0.51
- Pertambangan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	2,637.45
- Industri Pengolahan	46	47	48	44	49	51	49	49	55	57	12.36
- Listrik, Gas dan Air	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	-51.59
- Konstruksi	51	52	81	85	101	86	115	69	60	85	-1.33
- Perdag.Hotel & Rest	1,128	1,199	1,305	1,367	1,385	1,481	1,512	1,496	1,557	1,666	12.45
- Pengangk & Komunik	26	26	27	26	26	30	31	35	38	36	22.62
- Jasa dunia usaha	126	164	128	125	155	175	178	229	189	207	18.31
- Jasa sosial	44	49	56	59	60	72	95	108	38	37	-48.73
- Lain-lain	1,770	1,871	1,902	1,918	1,991	2,295	2,534	2,602	2,803	3,177	38.42
3 Suku bunga kredit (%)											
- Modal Kerja	16.73	16.91	16.95	16.64	16.11	15.93	15.36	15.18	14.81	14.22	
- Investasi	16.45	16.28	16.26	16.11	15.63	15.6	15.21	15.10	14.42	14.44	
- Konsumsi	15.42	15.45	15.36	15.39	14.93	14.58	14.3	14.16	13.89	13.75	

Sumber : KBI Mataram

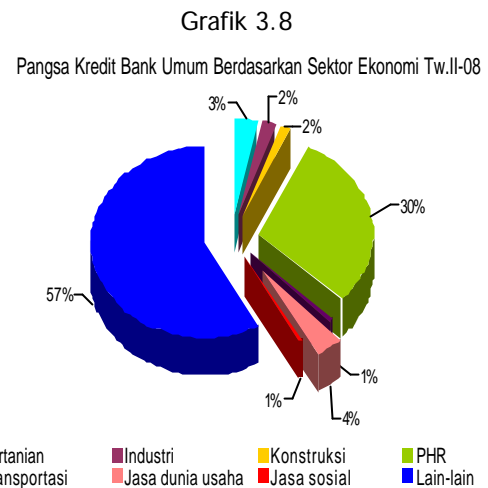
Pertumbuhan kredit konsumsi yang semakin meningkat sejak triwulan II-2007 menunjukkan bahwa pangsa pasar yang besar disertai pola konsumsi masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif menjadi daya tarik kuat bagi industri perbankan. Akibat kondisi tersebut, persaingan yang cukup tinggi di segmen yang sama mendorong bank untuk mencari alternatif pembiayaan dan fasilitas yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat, seperti kemudahan untuk memperoleh kartu kredit, kemudahan dalam proses pengajuan kredit yang relatif lebih singkat.

Penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai secara umum masih dalam kategori lain-lain (sebagian besar untuk konsumsi), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, jasa dunia usaha dan sektor pertanian. Sepanjang triwulan ini, pertumbuhan sektoral tertinggi tercatat di sektor pertambangan sebesar 2.637,45%, karena ada penambangan batu pasir di Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mengantisipasi pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL). Selain sektor pertambangan, sektor konsumtif 38,42%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi 22,62% dan jasa dunia usaha 18,31% juga mengalami peningkatan terkait dengan adanya penggantian armada perusahaan angkutan antar pulau dan taxi bandara serta pengembangan usaha koperasi karyawan. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan pada triwulan laporan adalah sektor listrik, gas dan air, sektor jasa sosial/masyarakat dan sektor konstruksi karena masyarakat lebih fokus untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan biaya anak sekolah.

Pertumbuhan kredit sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi sejalan dengan usaha pemda NTB untuk mengembangkan pariwisata Lombok dengan adanya percepatan realisasi pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) dan adanya kerja sama antara Pemda NTB, pemerintah pusat dengan PT EMAAR untuk pengembangan wisata di Kabupaten Lombok Tengah.



Sumber : KBI Mataram



Sumber : KBI Mataram

Pola penyebaran kredit secara sektoral relatif tidak berubah dibandingkan pada periode-periode sebelumnya, mengingat karakteristik perekonomian NTB tetap digerakkan oleh sektor pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Namun demikian, terdapat fakta yang menarik, bahwa meski secara nominal meningkat namun dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan kredit kepada sektor pertanian dan PHR cenderung mengalami penurunan walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbankan menilai risiko di sektor pertanian dan PHR telah berada pada level mendekati optimum dalam skala ekonominya, terkecuali ada sesuatu hal yang mendorongnya untuk lebih cenderung ekspansif dikaitkan dengan perkembangan sektor usaha lainnya dan permintaan yang semakin meningkat khususnya di sektor pertanian.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Kredit Bank Umum di NTB

Penyaluran Kredit	2006				2007				2008	
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2
1 Menurut Jenis Penggunaan										
- Modal Keria	41.88	32.18	34.06	31.33	23.55	28.95	26.03	18.46	11.72	13.50
- Investasi	21.15	16.54	8.72	11.26	16.47	3.12	(3.34)	1.43	(8.70)	(7.66)
- Konsumsi	17.99	17.18	14.95	14.26	12.37	22.82	33.48	36.00	41.05	38.55
2 Menurut Sektor Ekonomi										
- Pertanian	63.68	17.13	4.48	8.50	-3.02	25.01	13.85	1.87	-4.90	0.51
- Pertambangan	4.44	45.56	45.71	44.49	115.06	(30.47)	(42.30)	(35.88)	(57.99)	2.637.45
- Industri Pengolahan	59.02	73.01	57.38	34.05	5.83	9.46	3.47	10.28	11.09	12.36
- Listrik, Gas dan Air	67.23	21.70	28.76	25.00	(22.76)	(28.75)	(34.64)	(34.45)	(27.99)	(51.59)
- Konstruksi	55.51	64.25	112.69	74.87	98.48	65.31	42.24	(19.01)	(41.09)	(1.33)
- Perdaq. Hotel & Rest	38.30	28.72	32.26	31.08	22.76	23.52	15.80	9.41	12.38	12.45
- Pendaq. & Komunik	10.02	11.99	(6.90)	(10.25)	1.25	13.57	16.62	36.73	42.17	22.62
- Jasa dunia usaha	14.08	38.36	2.04	3.36	23.16	6.58	38.73	82.56	21.26	18.31
- Jasa sosial	(6.59)	(1.28)	4.00	6.34	36.15	46.28	70.43	82.50	(37.05)	(48.73)
- Lain-lain	17.90	16.86	14.96	14.35	12.48	22.66	33.27	35.69	40.76	38.42

Sumber : KBI Mataram

Kondisi ekonomi makro yang kurang menggembirakan pada triwulan II-2008 belum berdampak pada tingkat pengembalian kredit perbankan di NTB pada periode yang sama. Hal ini tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) gross yang menurun dari 3,65% pada triwulan II-2007 menjadi 2,94% dibawah NPL yang dihimbau Bank Indonesia sebesar 5%.

Tabel 3.4
Perkembangan Kualitas Kredit Bank Umum di NTB

Kolektibilitas Kredit	2007				2008	
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2
1 NPL (nominal, Rp jutaan)	93,351	159,999	170,851	137,930	163,720	160,698
NPL (%)	2.37	3.65	3.65	2.91	3.34	2.94
2 NPL per kelompok bank (%)						
- Bank Pemerintah	2.65	4.21	4.11	2.91	3.34	3.33
- Bank Swasta	1.10	1.11	1.58	3.18	3.65	1.08
3 NPL kredit per jenis penggunaan (%)						
- Modal Keria	3.48	6.65	6.88	5.39	6.43	5.82
- Investasi	3.17	4.53	4.68	2.97	4.87	4.25
- Konsumsi	1.34	1.28	1.22	1.23	1.24	1.05
4 NPL kredit per sektor ekonomi (%)						
- Pertanian	2.69	5.74	7.70	3.71	4.36	3.79
- Pertambangan	-	83.67	-	100.00	92.74	0.00
- Industri Pengolahan	0.34	14.23	15.68	2.03	2.27	1.84
- Listrik, Gas dan Air	-	-	-	0.00	0.00	0
- Konstruksi	3.19	13.85	12.51	8.50	12.67	9.76
- Perdag. Hotel & Rest	3.83	6.26	6.26	5.78	6.82	6.28
- Perdag. & Komunik	0.75	1.77	1.57	1.73	1.35	0.49
- Jasa dunia usaha	2.71	3.21	4.51	1.94	2.36	2.25
- Jasa sosial	1.60	1.41	0.93	0.99	4.05	2.72
- Lain-lain	1.36	1.31	1.25	1.25	1.25	1.06

Sumber : KBI Mataram

Berdasarkan lokasi kantor, penyumbang NPL tertinggi berasal dari bank umum yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa yang mencapai 6,45% diikuti oleh Bank Umum di Kabupaten Bima sebesar 5,49%, sedangkan penyumbang NPLs terendah terdapat di Kota Mataram mencapai 1,67%. Hal ini mengindikasikan bahwa kota Mataram sebagai ibu kota Propinsi NTB cukup prospektif dan tetap sebagai barometer usaha di NTB untuk berkembang. Pada triwulan laporan ada penambahan satu kantor cabang bank umum yang membuka cabangnya di Kota Mataram, sehingga memacu bank-bank lainnya untuk meningkatkan pelayanannya.

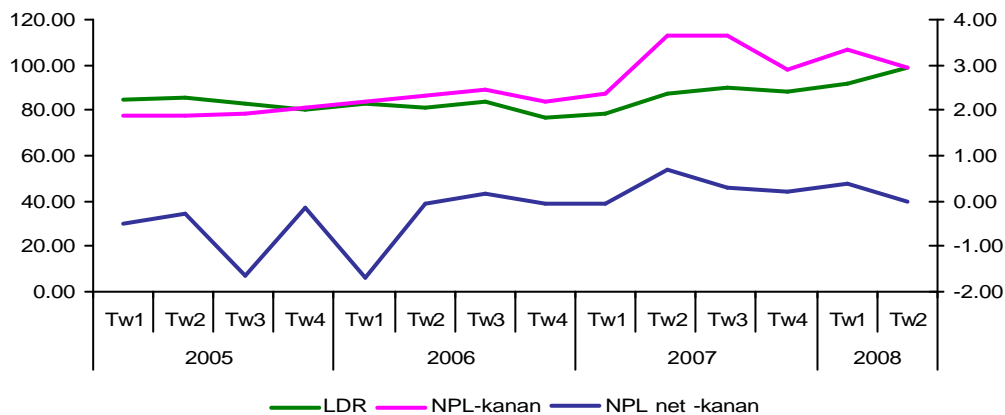
Pada triwulan laporan, sektor ekonomi yang NPLnya meningkat dibandingkan triwulan II-2007 yaitu sektor jasa sosial dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan yang turun cukup signifikan adalah sektor pertambangan diikuti dengan sektor industri pengolahan dan konstruksi. Penurunan NPLs pada sektor-sektor tersebut kemungkinan terkait dengan telah dimulainya pembangunan bandara internasional Lombok (BIL) dan pembayaran proyek-proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD.

Realisasi kredit baru pada triwulan laporan sebesar Rp431 miliar, meningkat sebesar 92,92% dibandingkan triwulan II-2007 yang mencapai Rp224 miliar dan lebih dominan untuk sektor konsumtif.

Peningkatan penyaluran kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan dana pihak ketiga menyebabkan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* bank umum di NTB meningkat signifikan dari 86,92% pada triwulan I-2007 menjadi 99,08% pada triwulan laporan. Namun, apabila dilihat dari sumbangan LDR dari masing-masing bank umum di NTB, masih terdapat 5 bank yang rasio LDR-nya masih dibawah 50,00%, sedangkan yang berkisar antara 50,00% sampai dengan 200% sebanyak 23 bank dan rasio LDR di atas 200% sebanyak 6 bank. Dibandingkan triwulan I-2008, terdapat pergeseran jumlah bank yang rasio LDR-nya dibawah 50,00% dari 7 bank menjadi 5 bank. Di sisi lain, terdapat satu bank yang baru berdiri pada bulan April 2008 telah mampu menyumbang LDR di atas 100%. Bank-bank yang memiliki rasio LDR di bawah 50,00% cenderung konsentrasi pada penghimpunan dana pihak ketiga sesuai arahan kantor pusatnya.

Grafik 3.9

Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum



Sumber : KBI Mataram

Sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit oleh bank umum yang berlokasi di NTB, peningkatan juga terjadi pada kredit yang diserap di wilayah ini baik yang disalurkan oleh bank umum yang berlokasi di NTB maupun oleh bank umum di luar NTB. Kredit yang disalurkan ke wilayah NTB sampai dengan bulan Mei 2008 mencapai Rp6,17 triliun atau tumbuh 25,65% (yoy). Sementara itu, kredit yang disalurkan oleh bank umum yang berlokasi di NTB posisi Mei 2008 mencapai Rp5.71 triliun atau tumbuh 24,04%. Jadi ada sekitar Rp 460 miliar dana yang bersumber dari luar NTB yang masuk ke NTB, yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa NTB cukup prospektif untuk tumbuhnya dunia usaha oleh para bankir nasional bahkan investor.

3.5 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum

Intermediasi perbankan daerah akan terus ditingkatkan, terutama untuk mendorong Bergeraknya UMKM sebagai lokomotif perekonomian daerah. Penyaluran kredit kepada sektor UMKM terus meningkat sejalan dengan berbagai program pendorong intermediasi perbankan telah dilakukan, diantaranya *linkage program* dan pembentukan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) serta hasil penelitian yang menunjang informasi bagi pihak perbankan dan dunia usaha. Program pemerintah untuk meningkatkan akses usaha mikro ke perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sumber dananya 100% merupakan dana murni perbankan, dan 70% risiko kredit bermasalah-nya ditanggung pemerintah melalui Askrindo dan Perusahaan Sarana Penjaminan Usaha telah direspon realisasinya di NTB. Dana yang telah tersalur melalui program ini oleh sebelas bank umum di NTB hingga triwulan II-2008 tercatat sebesar Rp40,63 miliar dengan baki debit Rp37,48 miliar. Di samping itu, Bank Indonesia juga telah membentuk tim fasilitasi percepatan pemberdayaan ekonomi daerah yang bertujuan mendorong peningkatan kredit ke sektor riil guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah pada tahun 2008, terutama di sektor pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja yaitu komoditas kacang tanah dan kedelai serta menjaga kesinambungan pengembangan rumput laut baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa hingga tahun yang akan datang.

Tabel 3.5
Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum di NTB

Jenis Kredit	2007				2008	
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2
1 Berdasarkan nilai kredit (milyar Rp)	3,879	4,274	4,574	4,634	4,812	5,307
- Mikro (sd Rp50 juta)	2,929	3,237	3,426	3,438	3,570	3,934
- Kecil (>Rp50 juta - Rp500 juta)	457	474	538	554	584	659
- Menengah (>Rp500 juta - Rp5 miliar)	493	563	610	641	657	714
2 Jumlah debitur *)						
- Mikro	159,193	167,638	165,306	166,545	165,966	170,230
- Kecil	3,369	3,521	4,075	4,261	4,558	5,050
- Menengah	483	534	574	611	633	691
3 Pangsa UMKM terhadap kredit BU (%)	98.5	97.58	97.63	97.61	98.24	97.17
- Mikro	74.38	73.89	73.12	72.42	72.89	72.03
- Kecil	11.60	10.83	11.49	11.68	11.92	12.07
- Menengah	12.52	12.85	13.01	13.51	13.42	13.07
4 NPL kredit UMKM (%)						
- Mikro	2.03	3.17	2.96	2.74	3.09	2.87
- Kecil	4.60	5.70	5.86	5.45	5.87	4.67
- Menengah	2.44	5.23	6.06	1.95	2.75	2.27
*) dengan asumsi jumlah rekening						

Sumber : KBI Mataram

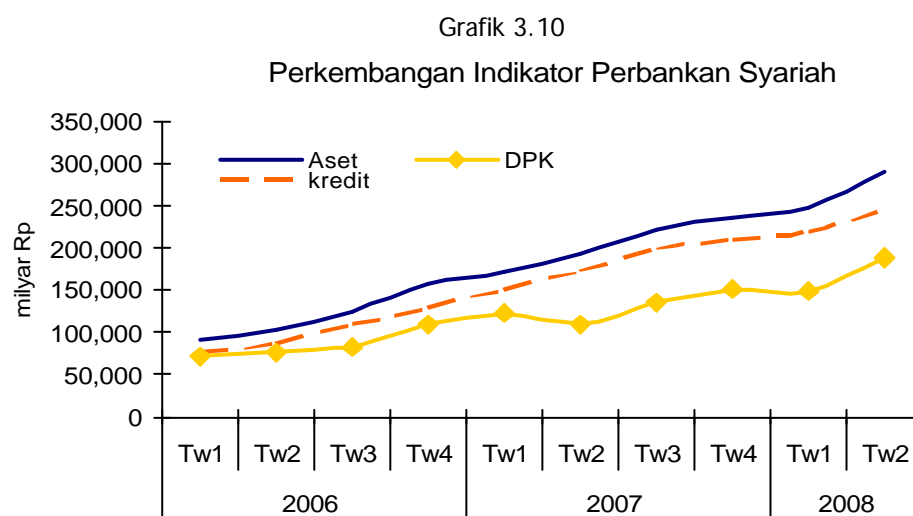
Sampai dengan triwulan II-2008, perkembangan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan. Dengan tingkat pertumbuhan kredit mencapai 24,17% (yoy) mampu memperluas pangsaanya terhadap total kredit hingga mencapai 97,17% walaupun sedikit menurun dibandingkan triwulan I-2008 sebesar 98,24%.

Pertumbuhan kredit UMKM cenderung lebih tinggi dibandingkan kredit secara total. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki potensi yang besar untuk diolah dan dimanfaatkan oleh sektor perbankan. Namun seringkali perbankan terbentur dengan kendala-kendala, diantaranya kemampuan dan ketersediaan SDM setiap bank.

Berkaitan dengan realisasi kredit melalui *linkage program* antara bank umum dan BPR, sampai dengan triwulan laporan telah mencapai Rp10.5 milyar dengan jumlah peserta 17 BPR dan 11 Bank Umum. Saat ini terdapat 2 BPR sedang dalam proses *linkage*. Sementara itu, alasan beberapa BPR yang belum linkage dengan bank umum antara lain karena tidak adanya agunan yang dimiliki oleh BPR, dana masyarakat yang dirasakan mencukupi untuk penyaluran kredit, adanya setoran modal dari pemilik dan NPL BPR yang masih di atas 5%.

3.6. Perkembangan Perbankan Syariah

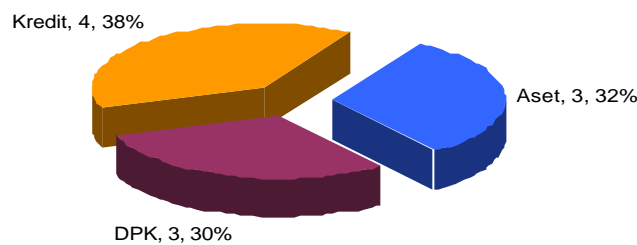
Perbankan Syariah mencatatkan perkembangan yang cukup menggembirakan selama triwulan II-2008, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan yang dilakukan. Proses sosialisasi dan pengenalan prinsip syariah yang terus dilakukan oleh perbankan dan Bank Indonesia mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap segmen perbankan ini dari waktu ke waktu.



Sumber : KBI Mataram

Sampai dengan triwulan II-2008, pertumbuhan aset perbankan syariah meningkat sebesar 50,49% (yoy) dari Rp192 miliar pada triwulan yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp289 miliar pada triwulan laporan. Pertumbuhan tersebut lebih kecil bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 85,22%. Meskipun demikian, dengan pangsa sebesar 3,32% terhadap total aset perbankan NTB masih dirasakan cukup jauh untuk mencapai target sebesar 5% pada akhir tahun 2008. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 40,93% (yoy) sehingga mencapai Rp245 miliar. Pertumbuhan pembiayaan tersebut di danai oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp80 miliar (73,83%) secara kumulatif meningkat menjadi Rp188 miliar.

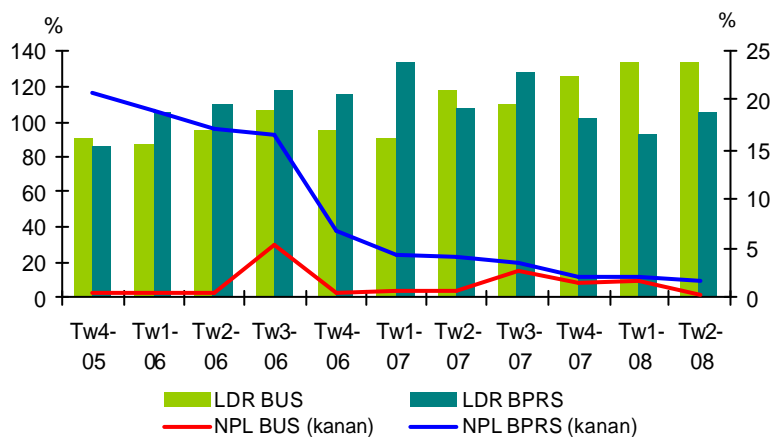
Grafik 3.11
Pangsa Bank Syariah terhadap Perbankan NTB Tw2-08



Sumber : KBI Mataram

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mencerminkan fungsi intermediasi pada segmen perbankan syariah di NTB telah mencapai 129,91%. Namun, disini lain perbankan syariah mampu mempertahankan Rasio *Non Performing Financing* (NPFs) pada level yang moderat yaitu berkisar 0,43% untuk bank umum dan 1,81% untuk BPRS.

Grafik 3.12
Perkembangan Rasio FDR dan NPF



Sumber : KBI Mataram

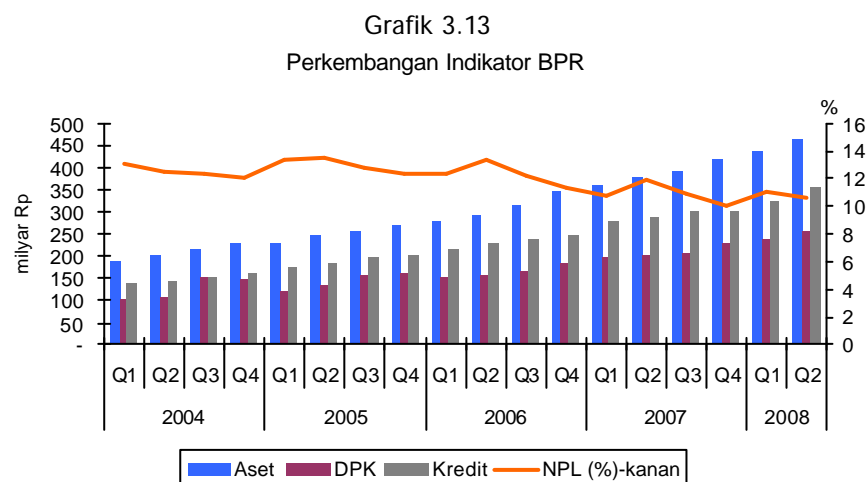
Tanpa adanya rencana pembukaan kantor bank syariah yang baru atau pengalihan fungsi dari kantor cabang konvensional ke unit/cabang syariah, target pangsa aset bank syariah 5% akan sulit tercapai pada akhir tahun 2008 ini. Oleh sebab itu, Bank Indonesia akan membantu mempermudah proses pendirian kantor atau bank syariah sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat akan kebutuhan bank berprinsip syariah.

3.7. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat

Ekspansi kredit yang dilakukan BPR juga tetap berkualitas dengan angka rasio NPL yang cenderung menurun. Kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) yang sama dengan bank umum, namun memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank umum. BPR memiliki prosedur pemberian kredit yang lebih sederhana dan lebih cepat serta lebih mengutamakan pendekatan personal. Sebagian besar BPR yang ada di wilayah NTB dimiliki oleh pemerintah daerah baik pemda kabupaten/kota maupun propinsi dan umumnya berlokasi di wilayah kecamatan.

Perkembangan indikator BPR di wilayah Bank Indonesia Mataram selama triwulan II-2008 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan Juni 2008, terdapat 68 BPR dengan 77 jumlah kantor, serta 3 BPR yang beroperasi secara syariah. Proses intermediasi BPR berjalan cukup baik seiring dengan perbaikan kualitas kredit.

Total aset BPR pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp463 miliar atau meningkat sebesar 23,11% dibandingkan dengan triwulan II-2007. Peningkatan tersebut lebih banyak bersumber dari dana pihak ketiga yang meningkat sebesar 26,52% sehingga menjadi Rp255 miliar. Suku bunga yang relatif lebih tinggi dan kemudahan pelayanan setoran nasabah menjadi daya tarik BPR dalam menyedot dana masyarakat.



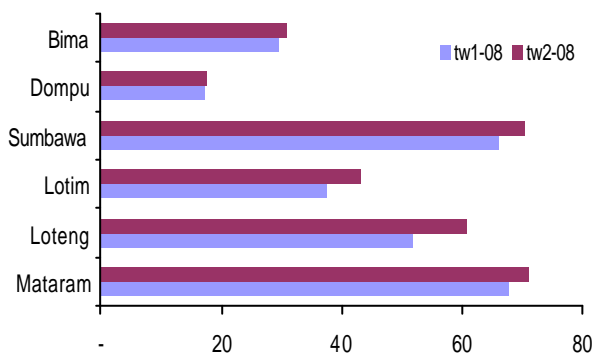
Sumber : KBI Mataram

Total kredit/pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh BPR/S di NTB sebesar Rp354 miliar, meningkat sebesar 24,63% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp284 miliar diiringi dengan perbaikan kualitas kolektibilitas kredit yaitu dari 11,88% menjadi 10,69%. Ditinjau dari sektor ekonomi yang dibiayai, kredit BPR masih didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pangsa 43,97% diikuti sektor lain-lain (sebagian besar untuk konsumsi) sebesar 40,04% dan sektor jasa sebesar 9,47%. Sementara itu, sektor pertanian sebagai sektor unggulan ke dua NTB pangsa kredit yang disalurkan oleh BPR/S hanya sebesar 5,92%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2008 dengan pangsa 3,83%.

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, sebagian besar rasio NPL gross di kabupaten/kota di NTB berada di atas target indikatif Bank Indonesia yang sebesar 5% dan hanya satu daerah dengan NPL gross dibawah target indikatif yaitu Kota Mataram. Rasio antara kredit/pembiayaan dengan DPK (LDR) pada triwulan laporan sebesar 138,43% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 140,53%. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dihimpun BPR dari masyarakat, seluruhnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, bahkan BPR menggunakan sebagian modalnya untuk menyalurkan kredit.

Grafik 3.14

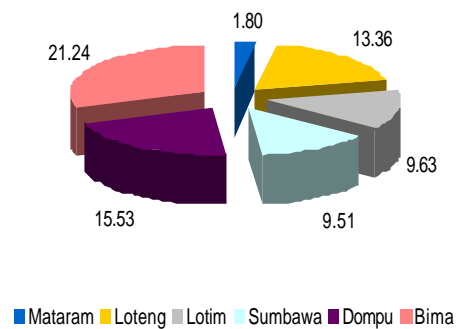
Penyaluran Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor BPR



Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.15

Rasio NPL BPR berdasarkan lokasi kantor Tw.2-08



Sumber : KBI Mataram

Untuk meningkatkan kinerja industri BPR, telah ditempuh beberapa upaya strategis, termasuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) BPR serta memperkuat daya saing dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPR. Langkah yang ditempuh berupa pelaksanaan sertifikasi bagi direksi BPR. Dari 68 BPR yang ada di wilayah kerja KBI Mataram, yang telah memiliki direksi bersertifikat baru 65 BPR dan 1 direksi BPR sedang mengikuti sertifikasi serta 2 direksi sedang dalam pengusulan untuk mengikuti sertifikasi.

Sosialisasi dan pembinaan oleh Bank Indonesia Mataram tentang ketentuan dan peningkatan mutu dalam operasional dan profil risiko BPR terus dilakukan. Target akhirnya adalah penurunan risiko kredit, operasional dan peningkatan kualitas manajemen BPR.

Boks 3

Implementasi Peran KBI Mataram Dalam Rangka Pengembangan Sektor Riil dan UMKM

Upaya menggerakkan sektor riil yang dilakukan KBI Mataram di tahun 2008 ini tidak lepas dari komitmen Bank Indonesia yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia dalam pidato Bankers Dinner di awal tahun 2007 maupun 2008. Beberapa program pengembangan sektor riil telah mulai dirintis sejak tahun 2007 melalui Proyek Inisiatif yang dilakukan beberapa KBI, antara lain Pilot Project Klaster di 6 (enam) KBI dan Pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) di 8 (delapan) KBI. Saat ini program tersebut telah menjadi salah satu tugas pokok dari Tim/kelompok yang baru dibentuk di semua KBI di Indonesia. Implikasi tersebut memberikan peran yang lebih besar bagi KBI untuk bekerjasama dengan stakeholders lain di daerah dalam membantu pemerintah daerah untuk memfasilitasi bergeraknya perekonomian daerah di samping menjalankan peran sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah.

Saat ini terdapat beberapa kegiatan pengembangan sektor riil dan UMKM yang dilakukan dalam kerangka bantuan teknis Bank Indonesia, yaitu program tindak lanjut pengembangan klaster dan program Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (FPED).

1. Program Tindak Lanjut Pengembangan Klaster Rumput Laut

Komitmen KBI Mataram dalam memberdayakan sektor riil dan UMKM diwujudkan dengan melanjutkan pengembangan klaster rumput laut di kawasan Gerupuk, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Program tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2008 antara lain :

1) Penyebarluasan hasil pilot project klaster rumput laut tahun 2007

Hasil-hasil dan rekomendasi selama pelaksanaan pilot project klaster tahun 2007 ditulis dalam bentuk laporan akhir. Selanjutnya, KBI Mataram melakukan penyebarluasan hasil-hasil selama pelaksanaan pilot project klaster pada pemerintah kabupaten di NTB yakni Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Dompu.

Tujuan penyebarluasan dimaksud adalah untuk menginformasikan hasil-hasil pilot project klaster yang telah dilaksanakan oleh KBI Mataram tahun 2007 dan menjajaki kemungkinan kerjasama dengan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengembangan rumput laut.

Hasil dari kegiatan penyebarluasan ini adalah telah dijajaki kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan pelatihan manajemen usaha kepada 120 pembudidaya rumput laut di kawasan Gerupuk, Lombok Tengah dan dijajaki kerjasama dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka penelitian uji kecocokan pertumbuhan beberapa jenis rumput laut dan kandungan kadar karaginan.

- 2) Pelatihan manajemen usaha bagi 120 KK pembudidaya rumput laut di Kawasan Gerupuk, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Pelatihan manajemen usaha dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah dan direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2008, bertujuan memberikan bimbingan kepada kelompok pembudidaya rumput laut tentang manajemen usaha sehingga kegiatan usahanya dapat lebih berkembang dan memiliki nilai tambah.

- 3) Penelitian uji kecocokan pertumbuhan beberapa jenis rumput laut dan kandungan kadar karaginan

Penelitian yang dilakukan merupakan kerjasama dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat dan Peneliti dari Fakultas MIPA Universitas Mataram. Rencananya dilaksanakan pada bulan September 2008, bertujuan untuk mengetahui jenis rumput laut yang memiliki daya tumbuh optimum dan memiliki kandungan karaginan tertinggi di perairan Sumbawa Barat.

2. Program Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (FPPED)

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi daerah, Bank Indonesia memandang perlu untuk meningkatkan peran sebagai katalisator terutama dalam memfasilitasi dan mengoptimalkan koordinasi antar instansi terkait di daerah. Menindaklanjuti pelaksanaan peran dimaksud selanjutnya dibentuk Tim Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) yang dipayungi SK Gubernur NTB Nomor 157 tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008.

Tujuan pendirian TFPPED adalah sebagai sarana fasilitas BI dalam berperan aktif mengakselerasi pemberdayaan ekonomi daerah, melalui optimalisasi hasil-hasil kajian,

program/kesepakatan pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya untuk menggerakkan sektor riil yang selama ini masih terkendala dalam koridor peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka TFPED adalah :

- 1) Melakukan penandatanganan kerjasama antara KBI Mataram, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB dan PT. Bumi Mekar Tani (PT. BMT) pada tanggal 18 April 2008 tentang Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah.
- 2) Melaksanakan pertemuan TFPED NTB pada tanggal 29 Mei 2008
- 3) Sedang melaksanakan penelitian produktivitas kacang tanah melalui demplot/petak seluas 1 hektar (Laboratorium Lapang) bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB bertempat di Desa Sayong, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Penelitian yang dilakukan meliputi uji beberapa varitas benih unggul kacang tanah, perbedaan jarak tanam dan perbedaan penggunaan pupuk dan bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas kacang tanah yang dihasilkan berdasarkan beberapa perlakuan dan sebagai sarana pembelajaran (Sekolah Lapang) bagi petani kacang tanah di lokasi binaan (Desa Sayong dan sekitarnya).

Penelitian dimaksud memerlukan waktu sekitar 120 hari dan hasil penelitian akan disampaikan dalam pertemuan TFPED NTB.

- 4) Melaksanakan pertemuan sosialisasi skim kredit Bank dan temu wicara proses sertifikasi tanah oleh BPN NTB kepada 40 petani kacang tanah mitra PT. Bumi Mekar Tani bertempat di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat pada tanggal 28 Mei 2008.
- 5) Melaksanakan pertemuan sosialisasi skim kredit Bank, Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) Setia Kawan dan temu wicara proses sertifikasi tanah oleh BPN NTB kepada 40 petani kacang tanah mitra PT. Bumi Mekar Tani bertempat di Desa Sayong, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat pada tanggal 16 Juni 2008.

Hasil dari kegiatan TFPED adalah telah disalurkan kredit perbankan kepada 7 petani komoditi kacang tanah dan kedelai dengan nilai kredit Rp222 juta sampai dengan posisi bulan Juni 2008 oleh 2 bank di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB 4 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

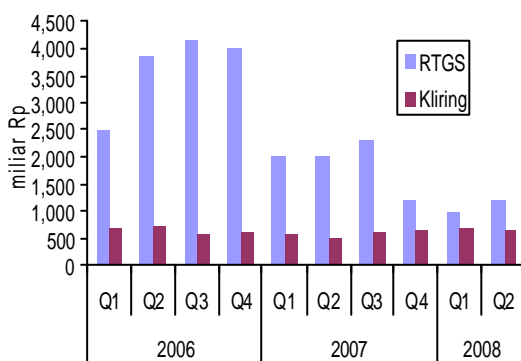
Perkembangan sistem pembayaran di NTB tetap lancar, aman dan terkendali. Pola inflow, outflow di Bank Indonesia belum ada perubahan, namun ekspansi kredit perbankan menyebabkan kecenderungan nilai net outflow pada periode ini lebih tinggi dari posisi-posisi tahun sebelumnya. Sementara itu, kecenderungan menurunnya nilai transaksi RTGS dan kliring sepanjang dua tahun terakhir lebih disebabkan kecenderungan masyarakat yang menggunakan ATM dalam transaksi pengiriman uang kepada mitra bisnisnya pada bank yang sama dengan nilai relatif kecil, yaitu rata-rata di bawah Rp50 juta/hari.

4.1. Transaksi Pembayaran Non Tunai

Penyelesaian transaksi non tunai dengan menggunakan sarana RTGS maupun kliring pada triwulan laporan menunjukkan kecenderungan menurun sepanjang dua tahun terakhir, meskipun relatif meningkat dibandingkan triwulan I-2008. Secara nominal, transaksi dengan menggunakan RTGS lebih besar dibandingkan dengan transaksi kliring. Selama triwulan II-2008, penyelesaian transaksi BI-RTGS di KBI Mataram mencapai Rp1,211 miliar, sementara melalui sistem kliring tercatat Rp657 miliar.

Grafik 4.1

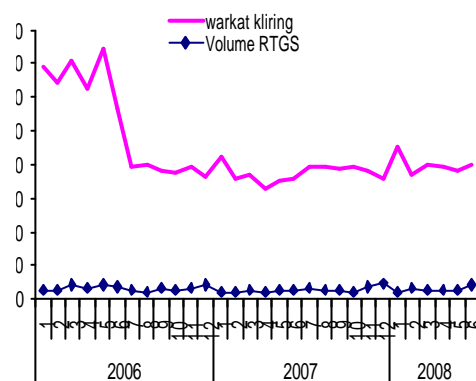
Perkembangan Nilai Transaksi Non Tunai di NTB



Sumber : KBI Mataram

Grafik 4.2

Perkembangan Jumlah Warkat Kliring dan RTGS



Sumber : KBI Mataram

Berdasarkan konfirmasi dari beberapa bank besar di NTB, kecenderungan penurunan transaksi baik kliring maupun RTGS disebabkan transaksi yang dilakukan nasabah lebih banyak menggunakan ATM dan setoran tunai untuk ditransfer ke rekening lawan bisnis di daerah lain. Selain itu, dengan

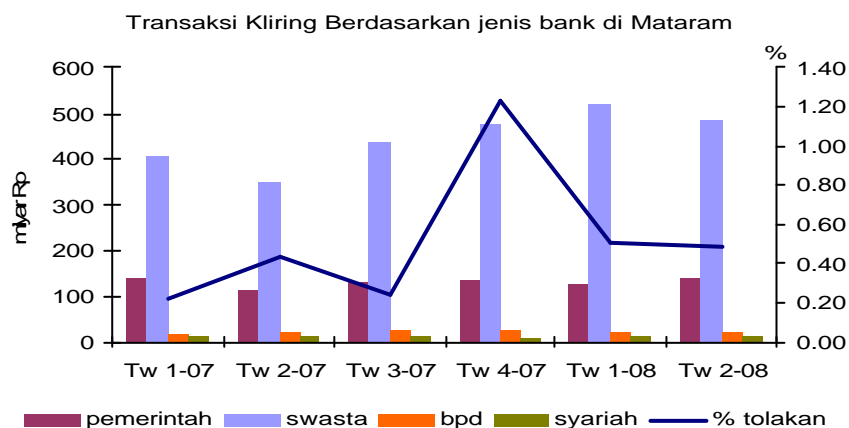
bertambahnya jumlah bank yang beroperasi di Kota Mataram memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk cenderung melakukan transaksi dengan bank yang sama. Kisaran transaksi pengiriman melalui ATM tersebut relatif dalam jumlah yang kecil per harinya rata-rata dibawah Rp50 juta/hari. Namun untuk pelaku bisnis, frekuensinya dapat dilakukan beberapa kali ke mitra bisnisnya hingga batas maksimal transfer yang ditetapkan bank. Hal ini mengindikasikan nasabah memiliki perhatian yang besar terhadap masalah biaya dan kecepatan transaksinya.

a. Transaksi Kliring

Meskipun dalam dua tahun terakhir penyelesaian transaksi dengan menggunakan sarana kliring menurun, transaksi kliring di wilayah NTB pada triwulan II-2008 mencapai Rp657 miliar (secara tahunan meningkat sebesar 34,36%). Dilihat dari volumenya, jumlah warkat yan diproses melalui kliring tercatat sebanyak 23.387 lembar, meningkat 12,38 % (yoy) atau sebanyak 20.810 lembar. Peningkatan transaksi melalui kliring ini diduga karena adanya peningkatan pada sektor perdagangan dan transaksi menjelang pilkada gubernur.

Selama triwulan II-2008 Cek/BG kliring yang ditolak karena saldo tidak cukup, baik dari sisi jumlah warkat maupun nilai transaksi relatif kecil. Persentase jumlah nominal dan volume cek dan BG yang ditolak periode laporan masing-masing adalah 0,48% dan 0,58%, dengan nominal sebesar Rp3.185 miliar dan jumlahnya 139 lembar warkat.

Grafik 4.2.



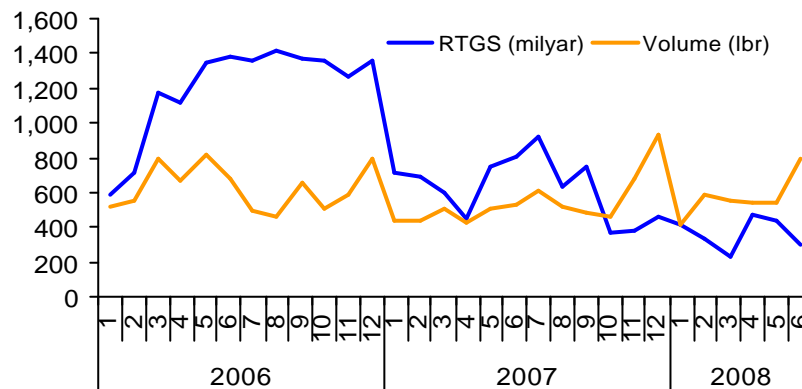
Untuk meningkatkan kualitas kliring, Bank Indonesia telah memberlakukan penerbitan daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilyet giro kosong.

b. Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Penyelesaian transaksi non tunai melalui RTGS mengalami penurunan dari sisi nominal namun dari sisi volume transaksi terdapat peningkatan. Transaksi outgoing yang merupakan setoran tunai bank, selisih lebih dan transaksi SP2D melalui RTGS sedangkan transaksi incoming merupakan transaksi pelimpahan pajak dari bank umum ke rekening Kas Negara dan retur kliring. Dilihat dari volume, jumlah transaksi RTGS pada triwulan laporan sebanyak 1.878 transaksi, meningkat 26,72% dibandingkan triwulan II-2007 yang mencapai 1.482 transaksi. Sedangkan dari sisi nominal transaksi RTGS sebesar Rp1.211 miliar, menurun dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 39,24%. Namun jika dibandingkan dengan triwulan I-2008 transaksi RTGS baik dari sisi nominal maupun volume mengalami peningkatan masing-masing sebesar 21,83% dan 19,47%. Tren meningkatnya transaksi ini mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan transfer dana yang cepat, baik untuk kegiatan bisnis maupun pembayaran atas kebutuhan nasabah serta untuk kepentingan perbankan dan pemerintah.

Grafik 4.3

Perkembangan Transaksi RTGS di NTB

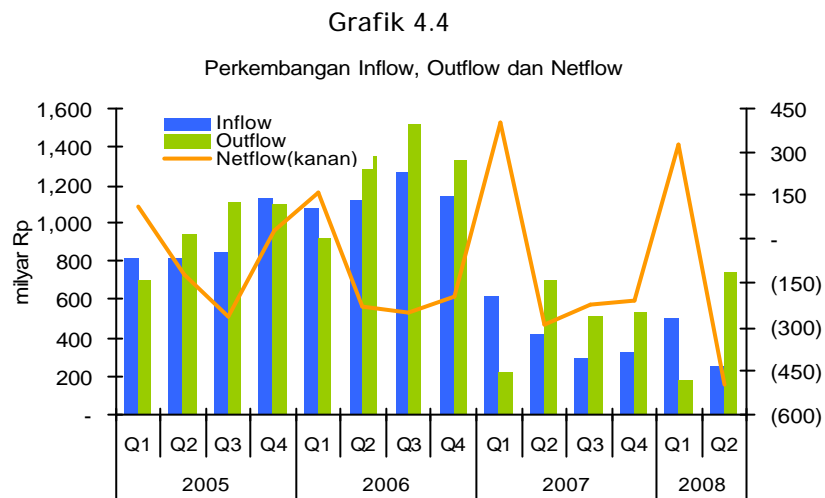


Sumber : KBI Mataram

4.2. Transaksi Pembayaran Tunai

Dengan kecenderungan peningkatan kredit perbankan dan konsumsi masyarakat meningkat, maka mengakibatkan outflow meningkat. Perkembangan *inflow* atau aliran uang masuk ke kas Bank Indonesia Mataram pada triwulan II-2008 cenderung menurun dan aliran uang keluar (*outflow*) cenderung meningkat bila dibandingkan triwulan I-2008 maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Ketentuan Bank Indonesia yang membatasi penyetoran uang kartal ke Bank Indonesia hanya untuk uang yang layak edar (UTLE) serta optimalisasi pelaksanaan *management cash* antar

bank melalui fokus group telah berjalan dengan efektif. Seperti pada periode tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan II terjadi *net outflow* karena aliran uang masuk (*cash inflow*) lebih kecil dibandingkan aliran uang keluar (*cash outflow*), atau dengan kata lain setoran dari perbankan masih lebih kecil dibandingkan penarikan yang dilakukan oleh perbankan. Hal ini disebabkan ekspansi kredit perbankan dan optimalisasi penggunaan plafond kredit oleh debitur yang terlihat dari *undisbursed loans* semakin kecil dimana pada triwulan laporan sebesar 7,06% sedangkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,87% dan tahun sebelumnya lagi sebesar 9,40%.

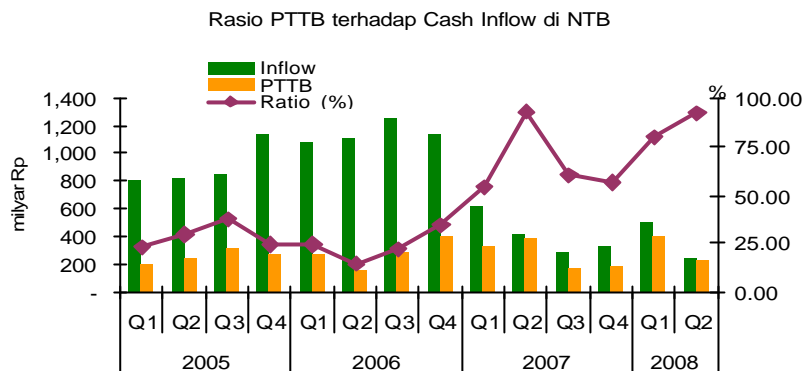


Sumber : KBI Mataram

Aliran uang masuk ke kas Bank Indonesia yang berasal dari setoran bank umum di NTB selama triwulan II-2008 tercatat sebesar Rp245 miliar atau menurun sebesar 50,90% dari triwulan I-2008 yang mencapai Rp499 miliar. Sementara itu, *cash outflow* dari kas Bank Indonesia Mataram tercatat sebesar Rp744 miliar atau meningkat sangat signifikan dibandingkan triwulan I-2008 mencapai 325,14% dengan nominal Rp175 miliar. Peningkatan kegiatan perkasan (*net outflow*) ini disebabkan nasabah kecil menarik dananya untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga dan keperluan sekolah anak dan peningkatan tensi kegiatan politik.

Terkait dengan transaksi pembayaran secara tunai, kebijakan Bank Indonesia masih tetap bertujuan untuk senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jumlah nominal yang cukup menurut jenis pecahan dan dalam kondisi layak edar. Pemilahan uang yang layak edar dan tidak layak edar dilakukan dengan menggunakan mesin racik uang kertas (MRUK) dan mesin sortir uang kertas (MSUK). Untuk uang yang sudah tidak layak edar (UTLE) dilakukan pemberian tanda tidak berharga (PTTB). Di samping itu, terhadap uang yang sudah dimusnahkan tersebut dilakukan penggantian dengan uang layak edar dan secara periodik dilakukan penggantian uang emisi lama dengan emisi baru.

Grafik 4.5



Sumber : KBI Mataram

4.3. Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) Uang Kartal

Kebijakan Bank Indonesia yang mengatur penyetoran uang kartal ke BI hanya untuk uang yang tidak layak edar (UTLE) turut mempengaruhi rasio PTTB uang kartal. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya pencetakan uang serta untuk meningkatkan periode perputaran uang di masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan kesadaran atau "*awareness*" masyarakat untuk menjaga kualitas kertas uang yang beredar agar selalu dalam kondisi layak edar.

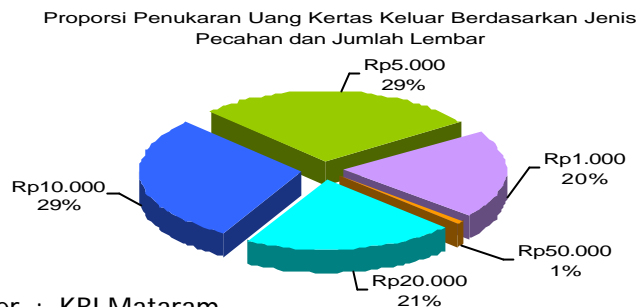
Secara nominal, jumlah PTTB uang kartal yang sudah tidak layak edar mengalami penurunan seiring dengan penurunan aliran uang masuk. Selama triwulan II-2008, jumlah PTTB di NTB mencapai Rp227 milyar atau rata-rata sebesar Rp75,6 miliar/bulan. Bila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, terdapat penurunan nominal, demikian pula terhadap triwulan I-2008. Porsi jumlah PTTB terhadap *cash inflow* pada triwulan laporan mencapai 92,65% meningkat dibandingkan triwulan I-2008 yang mencapai 79,96% karena pertumbuhan *cash inflow* yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan PTTB.

4.4. Aktivitas Penukaran Uang Pecahan Kecil

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan mata uang rupiah pecahan kecil di masyarakat, Bank Indonesia Mataram bekerjasama dengan Kantor Wilayah Usaha Pos VIII Bali Nusra untuk melayani penukaran uang rupiah di daerah terpencil dan/atau perbatasan di NTB, tanpa dipungut biaya, sehingga diharapkan masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan uang pecahan sesuai dengan jumlah dan jenis pecahan yang dibutuhkan. Selain kerjasama tersebut, Bank Indonesia Mataram juga menyediakan loket penukaran uang dan melakukan kas keliling.

Selama triwulan laporan, secara nominal terlihat bahwa jumlah uang pecahan kecil yang ditukarkan mencapai Rp20.395 juta atau meningkat 42% dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan, penukaran keluar pecahan mata uang kertas rupiah yang paling diminati masyarakat adalah pecahan Rp10.000 sebanyak 598.500 lembar, diikuti oleh pecahan Rp5.000 sebanyak 1.164.220 lembar.

Grafik 4.6



Sumber : KBI Mataram

Selama triwulan II-2008, nilai uang yang telah ditukarkan melalui PT. Pos Indonesia sebesar Rp1.219 juta dan pecahan yang paling banyak diminta adalah Rp20.000 kebawah dengan fee penukaran yang telah diterima sebesar 3,58% dari nominal yang ditukarkan sudah termasuk pajak.

4.5. Penemuan Uang Palsu

Jumlah uang rupiah palsu yang ditemukan di wilayah NTB pada triwulan II-2008 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Uang

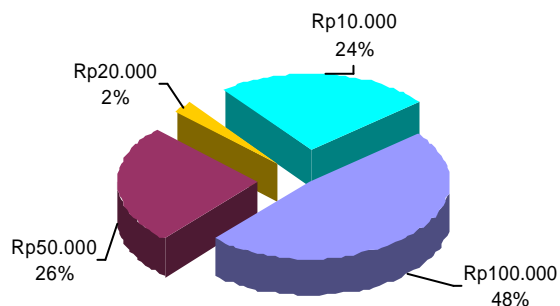
palsu yang ditemukan pada triwulan II-2008 tercatat sebanyak 86 lembar atau berjumlah Rp5,45 juta (0,00009% dari total dana pihak ketiga saat ini) lebih rendah dibandingkan triwulan yang lalu sebanyak 113 lembar. Dilihat dari jumlah lembarnya, pecahan Rp100

Sumber : KBI Mataram

ribu memiliki pangsa terbesar yaitu 48%, diikuti pecahan Rp50 ribu dan Rp10 ribu masing-masing dengan pangsa sebesar 26% dan 24%.

Grafik 4.7

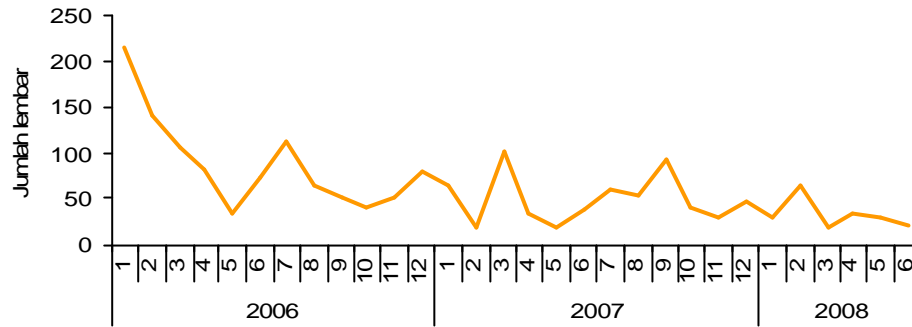
Proporsi jumlah lembar uang palsu yang ditemukan pada Tw II 2008 berdasarkan pecahan



Dalam rangka menekan dan mencegah peredaran uang palsu di masyarakat, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya diantaranya sosialisasi metode **3D** (dilihat, diraba, diterawang) kepada masyarakat melalui media

masa atau dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, bendaharawan dan pengusaha. Upaya sosialisasi ini membawa dampak positif sehingga pemahaman masyarakat untuk mengenali keaslian uang rupiah sudah lebih baik.

Grafik 4.8
Uang Rupiah Palsu yang ditemukan oleh perbankan di NTB



Sumber : KBI Mataram

BAB 5

PROSPEK EKONOMI DAN HARGA

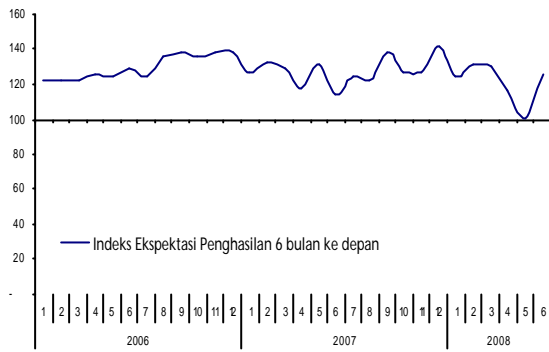
5.1 PROSPEK EKONOMI NUSA TENGGARA BARAT

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III-2008 mengindikasikan perbaikan pada kisaran 4,5-5,5%. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengalami peningkatan terutama saat tibanya bulan Ramadhan pada bulan September 2008. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut akan mengalami perlambatan akibat menurunnya daya beli masyarakat seperti yang tercermin dari relatif stabilnya indeks ekspektasi penghasilan pada periode 6 bulan mendatang. Kegiatan investasi diperkirakan akan terus membaik seiring kemajuan pembangunan infrastruktur bandara internasional Lombok Tengah. Lebih lanjut, kinerja ekspor yang didominasi konsentrat tembaga diproyeksikan akan relatif melambat akibat pengaruh perlambatan permintaan internasional dan permasalahan perizinan nasional.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh peningkatan produksi sektor pertanian maupun stabilnya kinerja sektor PHR. Sektor pertanian diproyeksikan akan tumbuh positif pada akhir triwulan III-2008 bertepatan dengan perkiraan pelaksanaan panen kedua untuk tanaman palawija. Namun demikian, faktor musim kemarau yang mengurangi kemampuan irigasi lahan patut dicermati agar tidak mengganggu kegiatan tanam padi yang juga masih berlangsung walaupun dalam skala kecil. Tibanya bulan Ramadhan pada triwulan ini diperkirakan akan menjaga momentum pertumbuhan di sektor PHR terutama akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat baik untuk bahan makanan maupun barang sandang, dan barang tahan lama (*durable goods*) lainnya. Sektor andalan lainnya, yakni sektor pertambangan masih terkendala permasalahan izin hutan pinjam pakai sehingga pertumbuhannya diperkirakan akan mengalami tekanan.

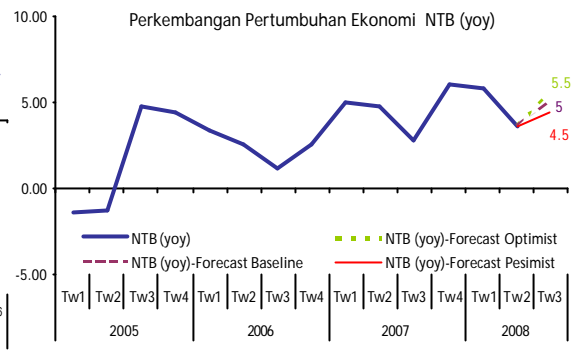
Kinerja pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat pada triwulan mendatang juga akan dipengaruhi faktor internal dan eksternal lainnya. Kelanjutan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I pada triwulan III-2008 yang masih menyisakan dana Rp98,6 miliar dari total alokasi dana Rp169,8 miliar diperkirakan cukup signifikan untuk mempengaruhi perekonomian Nusa Tenggara Barat. Di sisi lain, tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan turut berdampak pada penurunan permintaan komoditas ekspor dari Nusa Tenggara Barat.

Grafik 5.1 Indeks Ekspektasi Penghasilan



Sumber: BI

Grafik 5.2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi NTB



Sumber: BI

5.2 PERKIRAAN INFLASI NUSA TENGGARA BARAT

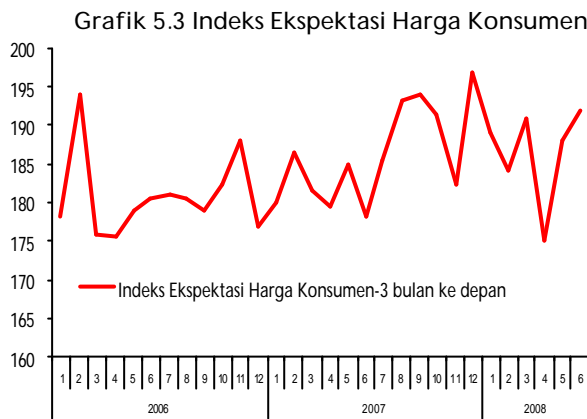
Inflasi Nusa Tenggara Barat pada triwulan mendatang diprediksi berada pada kisaran 10,5-11,5%. Lonjakan inflasi pada triwulan II-2008 akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di bulan Mei 2008 diperkirakan akan menyentuh titik kulminasi pada pertengahan triwulan III-2008 yakni menjelang tibanya bulan Ramadhan. Tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari sisi penawaran dan sisi permintaan.

Dari sisi penawaran, terdapat potensi tekanan inflasi dari komoditas *volatile foods* seperti beras dan bumbu-bumbuan. Tibanya musim kemarau pada triwulan III-2008 berpotensi mengganggu kegiatan produksi pertanian terutama tanaman bahan makanan. Hal tersebut terindikasi dari luas lahan tanam yang melebihi kapasitas irigasi, untuk wilayah Lombok Tengah tercatat luas lahan tanam sebanyak 19 ribu hektar sementara debit air yang ada hanya mampu mengairi 12 ribu hektar sehingga 7 hektar lahan terancam puso.

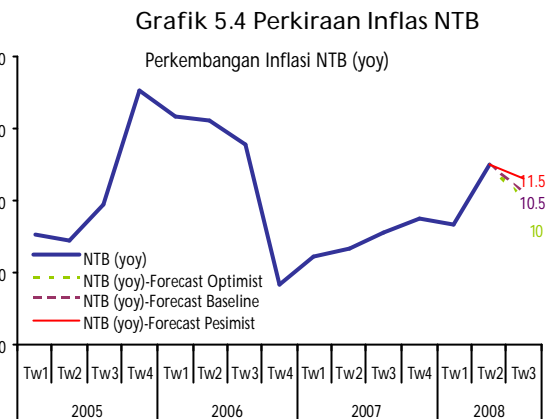
Di sisi permintaan, tekanan inflasi bersumber dari peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Meningkatnya konsumsi rumah tangga untuk bahan makanan maupun jasa transportasi menjelang tibanya bulan Ramadhan yang diikuti hari Idul Fitri, berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut. Selain itu, kemajuan pembangunan infrastruktur publik oleh pemerintah yang cenderung meningkat pada dua triwulan menjelang akhir tahun, diperkirakan akan menimbulkan tekanan inflasi pada komoditas bahan bangunan.

Permasalahan tata niaga serta infrastruktur distribusi barang yang masih memerlukan peningkatan juga akan berpengaruh terhadap inflasi. Masih relatif minimnya peningkatan kualitas akses jalan di Nusa Tenggara Barat terutama di Pulau Sumbawa berpotensi mendorong inflasi dari sisi biaya distribusi. Hal tersebut diindikasikan oleh lebih tingginya inflasi beberapa komoditas di Kota Bima dibandingkan di Kota Mataram pada bulan Juni 2008.

Beberapa sumber tekanan inflasi tersebut diperkirakan dapat dimitigasi oleh beberapa program pemerintah daerah selama ini. Pelaksanaan operasi stabilisasi harga beras dan harga minyak goreng, serta kelanjutan program penyaluran subsidi kedelai diharapkan mampu meredam tekanan inflasi komoditas *volatile foods*. Selain itu program subsidi transportasi oleh pemerintah daerah untuk transportasi udara, darat, dan laut dengan rute tertentu diharapkan juga mampu meredam tekanan inflasi di kelompok jasa transportasi.



Sumber: BI



Sumber: BI